



**BADAN POM**



# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I

Badan Pengawas Obat dan Makanan  
JI. Percetakan Negara No. 23



## PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja Inspektorat I ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2019 Inspektorat I Badan POM dalam melaksanakan tugas pengawasan intern dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), media penilaian kinerja, media penyampaian pertanggungjawaban kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam upaya memperbaiki serta meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance inmporvement*).

Laporan Kinerja Inspektorat I tahun 2019 ini diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dapat mendukung optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran Inspektorat I dalam mendukung kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Februari 2020  
Plt. Inspektur I Badan POM,



Dra. Zulaimah, Apt, M.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM Tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta transparansi penggunaan anggarannya. Laporan ini memuat capaian kinerja selama tahun 2019 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja 2019. Rencana Kinerja 2019 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat 2015-2019 yang telah direvisi berdasarkan restrukturisasi organisasi di Lingkungan Badan POM, dimana terjadi perubahan struktur organisasi Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM pasal 365, Inspektorat I Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I.

Untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM, Inspektorat I memiliki 6 Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I; (2) Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor; (3) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I; (4) Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I; (5) Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I dan (6) Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Strategis tersebut didukung oleh 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian sebagai berikut:

1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan sebesar 111,11% (sangat baik).
2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern dengan capaian sebesar 99,74% (Baik).
3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, dengan capaian sebesar 108,69% (Baik).
4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja dengan capaian sebesar 91,51% (Baik).

5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja dengan capaian sebesar 100% (Baik).
6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material dengan capaian sebesar 100% (Baik).
7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM dengan capaian sebesar 117,8% (Sangat Baik).
8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 106,28% (Baik).
9. Nilai AKIP Inspektorat I dengan capaian sebesar 96,47% (Baik).

Dari sembilan Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria sangat baik dengan capaian sasaran diatas 110% yaitu Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM. Untuk kriteria Baik sebanyak 7 (tujuh) indikator yaitu Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja, Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja, Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material, Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dan Nilai AKIP Inspektorat I.

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2019 untuk mencapai Sasaran Strategis dan IKU serta membiayai kegiatan lainnya, Inspektorat I memperoleh anggaran Rp7.436.030.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.386.986.673,00, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp103.866.935,00 sehingga realisasi netto sebesar Rp7.283.119.738,00 atau 97,94%.

Laporan Kinerja Inspektorat I ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Inspektorat I Badan POM pada tahun 2019 dan untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I di masa yang akan datang.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
A.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat I .....	1
A.2 Aspek Strategis .....	2
A.2.1 Analisis Lingkungan Strategis .....	3
A.2.2 Isu Strategis .....	5
B. STRUKTUR ORGANISASI .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
1) Perubahan Indikator .....	16
2) Penyesuaian Target .....	16
A1. Visi .....	17
A2. Misi .....	18
A3. Tujuan .....	19
A4. Sasaran .....	20
A5. Arah Kebijakan dan Strategi .....	22
A6. Program .....	24
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	26
C. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 .....	29
A.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	33
B. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PEBAIKAN HASIL EVALUASI SAKIP PERIODE TAHUN 2019 .....	73
C. REALISASI ANGGARAN .....	74
D. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN .....	77
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. KESIMPULAN .....	79
B. SARAN .....	81

## Daftar Gambar

No Gambar	Judul	Halaman
1	Tugas dan Fungsi Inspektorat I Badan POM	2
2	Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Jabatan	3
3	Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Golongan	4
4	Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan	4
5	Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM	9
6	Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM	10
7	Visi Inspektorat I Badan POM	18
8	Misi Inspektorat I Badan POM	18
9	Tujuan dan Indikator Tujuan	19
10	Sasaran Strategis Inspektorat I	20
11	Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kepala Badan POM	24
12	Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Utama	25
13	Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat I	25
14	Rumus Perhitungan Persentase Capaian	27
15	Hasil Penelusuran Pengaduan Tahun 2019	35
16	Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2019	38
17	Perbedaan Tools Survei Kepuasan Mitra Tahun 2018 dan 2019	39
18	Delapan Area Perubahan Yang Diselenggarakan Asesor BPOM	41
19	Ilustrasi Pencapaian Opini WTP dari BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM	58

## Daftar Tabel

No Tabel	Judul	Halaman
1	Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2019	5
2	Sasaran Strategis, Indikator serta Definisi Operasional Indikator Januari – Februari 2018 (SOTK lama)	12
3	Sasaran Strategis, Indikator serta Definisi Operasional Indikator Maret-Juli dan Agustus-Desember 2018 (SOTK baru)	14
4	Definisi Operasional Indikator	21
5	Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM	26
6	Anggaran Inspektorat I Badan POM Tahun 2019 per Sasaran	27
7	Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat I Tahun 2019	29
8	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i> (BSC)	30
9	Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2015 -2019 Berdasarkan Perspektif <i>BSC</i>	32
10	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1	34
11	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 1 dengan Unit sejenis	35
12	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2	38
13	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 2 dengan Unit sejenis	40
14	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3	43
15	Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan	43
16	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 3 dengan unit sejenis	45
17	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4	47
18	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-1	48
19	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 4 dengan Unit sejenis	49
20	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-2	51
21	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 5 dengan Unit sejenis	55
22	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5	57
23	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-1	58
24	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 6 dengan Unit sejenis	59
25	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-2	60
26	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-3	62
27	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 8 dengan Unit sejenis	63
28	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6	64
29	Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 9 dengan Unit sejenis	65
30	Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 terhadap Target Renstra 2019	67
31	Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah tidak relevan dengan Renstra Inspektorat I	71
32	Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat I Tahun 2019	74
33	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Kegiatan Tahun 2019	75
34	Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 serta perubahan terakhir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala Badan POM no 26 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Melalui peraturan tersebut, Badan POM melakukan penguatan kelembagaan dengan menajamkan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM RI. Penguatan kelembagaan difokuskan salah satunya pada penguatan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama yang dipimpin oleh Eselon I dengan membawahi 2 (dua) unit Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II dengan perbedaan utama pada aspek wilayah pengawasan.

#### A.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat I

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas pokok Inspektorat I Badan POM:

Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi :



**Gambar 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat I Badan POM**

## A.2 Aspek Strategis

Seiring dengan perkembangan organisasi Badan POM, peran dan fungsi Inspektorat I Badan POM juga ikut berkembang. Penguatan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan internal dalam organisasi Badan POM menjadi efektif dan dapat diandalkan. Sebagai pengawas intern, Inspektorat I menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dituntut untuk memberikan *early warning system* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, aparat pengawas intern diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Aparat pengawas intern tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern sebagai *quality assurance*, *consultant* dan

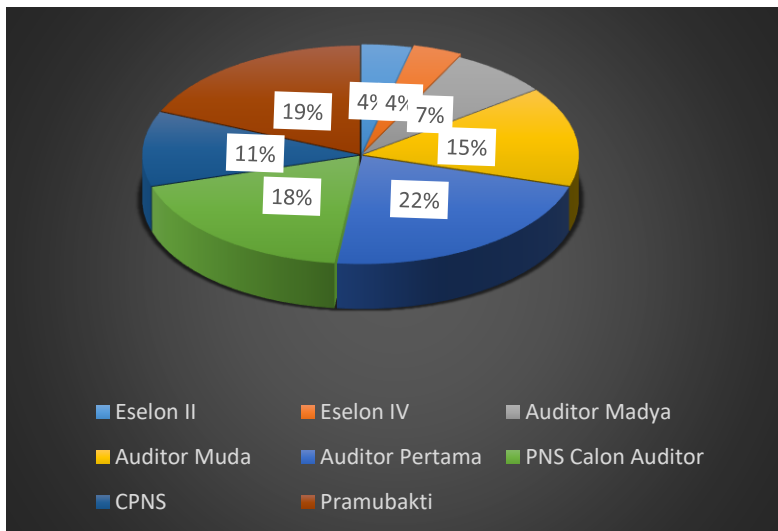
*trusted advisor* sehingga fokus pelaksanaan tugas pokok APIP mendampingi seluruh fungsi manajemen mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

### A.2.1 Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat I sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia, sarana & prasarana, serta anggaran.

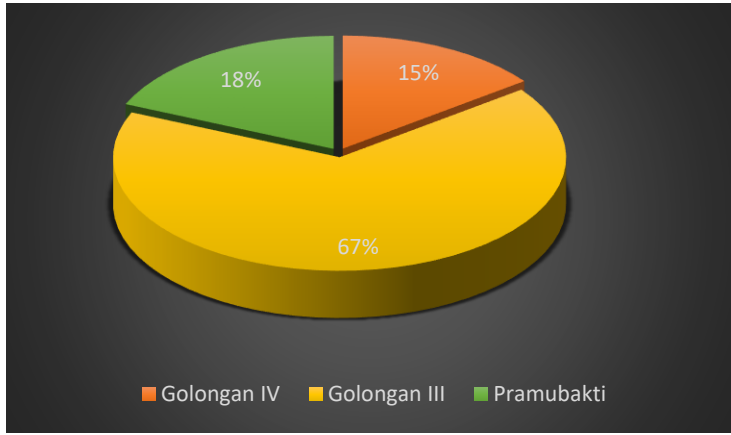
#### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Inspektorat I tahun 2019 seluruhnya sebanyak 27 orang yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 12 PNS auditor, 5 (lima) PNS calon auditor, 3 (tiga) CPNS dan 5 (lima) orang tenaga Pramubakti.



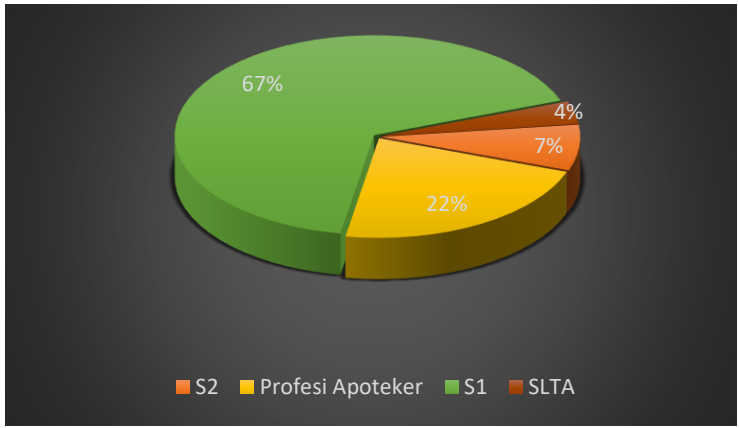
JABATAN	JUMLAH
<i>Eselon II</i>	1 orang
<i>Eselon IV</i>	1 orang
<i>Auditor Madya</i>	2 orang
<i>Auditor Muda</i>	4 orang
<i>Auditor Pertama</i>	6 orang
<i>PNS Calon Auditor</i>	5 orang
<i>CPNS</i>	3 orang
<i>Pramubakti</i>	5 orang
<b>Jumlah</b>	<b>27 orang</b>

Gambar 2. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Jabatan



GOLONGAN	JUMLAH
Golongan IV	4 Orang
Golongan III	18 Orang
Pramubakti	5 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>27 orang</b>

**Gambar 3. Komposisi SDM Inspektorat I Badan POM Berdasarkan Golongan**



PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	2 Orang
Profesi Apoteker	6 Orang
S1	18 Orang
SLTA	1 Orang

**Gambar 4. Komposisi SDM Inspektorat Badan POM Berdasarkan Pendidikan**

2) Sarana dan Prasarana

Sejak tahun 2019 ruang kerja Inspektorat I telah dipisah dari Inspektorat 2 yaitu pada Gedung I lantai 2 Badan POM pada sisi sebelah kiri, sedangkan sisi sebelah kanan ditempati oleh Inspektorat II. Untuk sarana dan prasarana Inspektorat I diadakan dan dikelola oleh bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

3) Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2019 Inspektorat I Badan POM didukung anggaran sebesar Rp7.436.030.000,00.

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Inspektorat I Tahun Anggaran 2019**

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi
4115			
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I			
4115.001			
Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I	7.436.030.000	7.283.119.738	97,94

Realisasi anggaran pengawasan intern pada Mitra Inspektorat I sebesar Rp7.386.986.673,00, terdapat pengembalian belanja sebesar Rp103.866.935,00 sehingga realisasi netto sebesar Rp7.283.119.738,00 atau 97,94%.

### A.2.2 Isu Strategis

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:

1) Manajemen Risiko SPIP terintegrasi dengan ISO 9001:2015

Manajemen Risiko di lingkungan Badan POM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, yang mana seluruh Satker/ Unit Kerja Pusat dan BB/ BPOM diwajibkan untuk melaksanakan Manajemen Risiko.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi APIP yang merupakan fungsi dari lini ketiga dalam *three lines of defence*, implementasi Manajemen Risiko dari masing-masing Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

- a. Satker/ Unit Kerja dan BB/ BPOM belum memahami secara komprehensif implementasi integrasi Manajemen Risiko dengan ISO 9001:2015.
- b. SDM yang menangani Manajemen Risiko belum mempunyai kompetensi yang memadai di bidang Manajemen Risiko.
- c. Penyamaan persepsi implementasi Manajemen Risiko yang belum dilakukan sesuai ketentuan.
- d. Belum terdapat standar selera risiko/ batas toleransi risiko dari pimpinan di lingkungan Badan POM

2) Gerakan Nasional Sapu Bersih Pungutan Liar (Gerakan Nasional Saber Pungli)

Pemberantasan pungutan liar (pungli) sangat serius diupayakan oleh pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo. Pungutan liar yang sudah terlalu lama dibiarkan terjadi mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan masyarakat di Indonesia. Pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Badan POM telah menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.04.1.6.11.16.4051 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM. Dalam hal ini, Inspektorat selaku Ketua Pelaksana Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Badan POM harus mampu mengkoordinasikan seluruh aktivitas pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar dalam rangka keberhasilan

Terwujudnya pelayanan publik pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terbebas dari pungutan liar.

3) Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan amanat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengawal pelaksanaan pemantauan pelayanan publik yang dilaksanakan Menpan, maka sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Inspektorat I sebagai koordinator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap seluruh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

4) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Berdasarkan PMK 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna

Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penanggung Jawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran, termasuk Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Pusat, membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang disampaikan. Pada pernyataan tanggungjawab laporan keuangan dinyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Salah satu temuan BPK dalam Audit Kinerja *Internal Control of Financial Report (ICOFR)* dan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 adalah pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan yang disusun manajemen belum didasari dengan mekanisme penilaian pengendalian intern/*Control Self-Assessment (CSA)* yang sistematis dan terdokumentasikan dengan baik.

Dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, Kementerian Keuangan menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) didefinisikan sebagai pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan berupa Untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan disusun dengan pengendalian intern yang memadai.

Menurut PMK tersebut, PIPK diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang dilaksanakan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Waktu penilaian pada tingkat Entitas dilaksanakan 1 (satu) kali tahun sekali dan dapat digunakan pada tahun berikutnya apabila entitas dipandang tidak mengalami

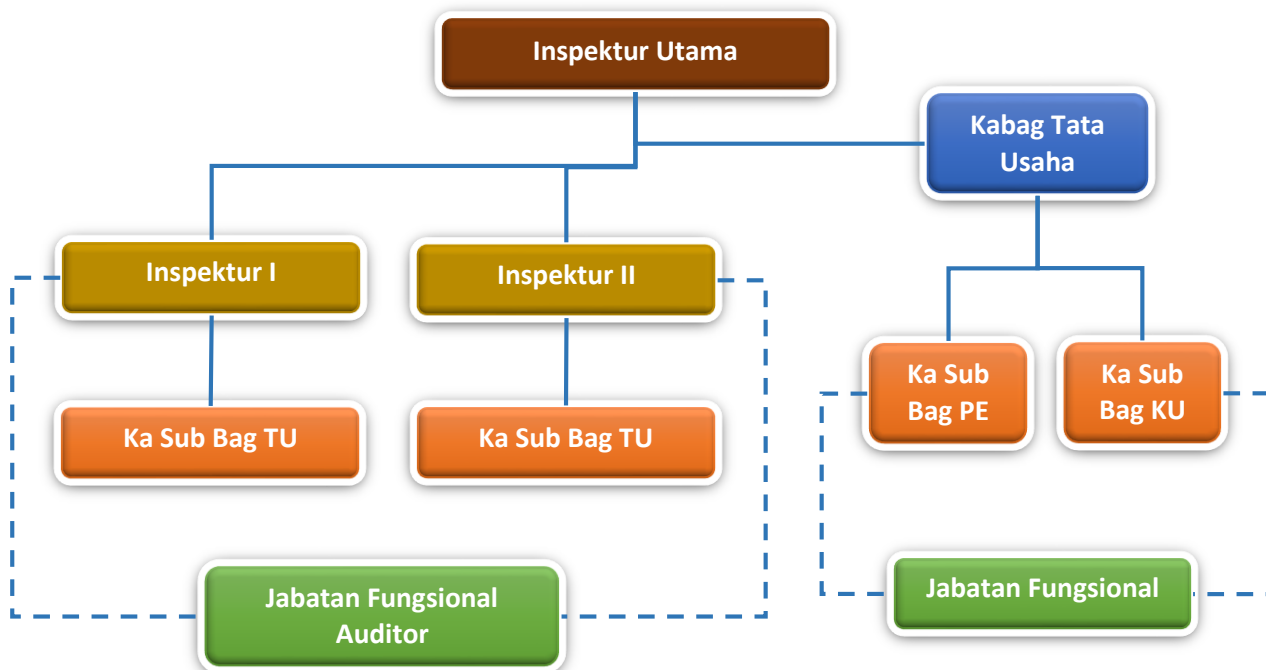
perubahan signifikan, penilaian tingkat proses/transaksi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali. Inspektorat I sebagai APIP sesuai Pasal 16 PMK melakukan reviu terhadap implementasi PIPK tersebut untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Kepala Badan POM mengenai penerapan PIPK secara memadai.

5) Evaluasi Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPOM, Inspektorat I secara aktif berperan dalam aspek bidang penguatan pengawasan.

**B. STRUKTUR ORGANISASI**

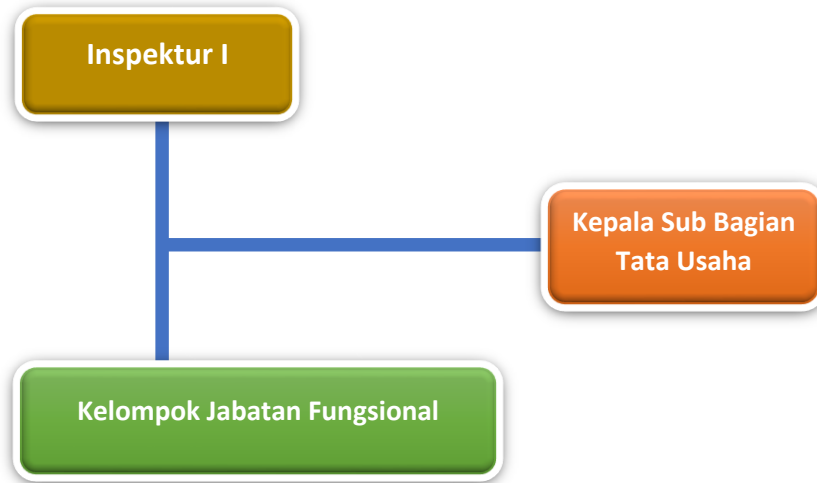
Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat I Badan POM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Utama Badan POM. Kedudukan Inspektorat I Badan POM secara umum ditunjukkan dalam bagan berikut:



**Gambar 5. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Inspektur I, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terlihat pada Bagan di bawah ini



**Gambar 6. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan dan ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang efektif, Inspektorat I sebagai bagian integral dari Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran strategisnya melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat I menyusun Rencana Strategis 2015 sampai dengan 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat I sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat I sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Rencana Strategis 2015 sampai dengan 2019 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis Badan POM 2015 sampai dengan 2019 menuju *Good Government dan Clean Governance*.

Inspektorat I Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM pasal 365 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat I menyelenggarakan fungsi antaran lain:

1. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup wilayah Inspektorat I;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup wilayah Inspektorat I;
3. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dilingkup wilayah Inspektorat I;
4. Pelaporan hasil pengawasan; dan Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi landasan awal dalam perencanaan guna mencapai tujuan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tahun 2019 merupakan periode terakhir pada RPJMN 2014-2019. Pada triwulan I tahun 2018, Badan POM mengalami restrukturisasi sesuai Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat yang sebelumnya merupakan unit Eselon II naik menjadi unit Eselon I dengan nomenklatur Inspektur Utama dan terdiri dari 2 (dua) unit Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan revisi Renstra Inspektorat menjadi Renstra Inspektorat Utama. Berdasarkan periode waktu revisi maka revisi terbagi pada 3 (tiga) periode yaitu yaitu bulan Januari – Februari 2018 merupakan SOTK lama dengan DIPA Inspektorat BPOM; bulan Maret – Juli 2018 merupakan SOTK baru namun masih menggunakan DIPA Inspektorat BPOM dan bulan Agustus–Desember 2018 merupakan SOTK baru yang telah menggunakan DIPA Inspektorat Utama BPOM. Selain itu pada tahun 2018 dilakukan Revisi Renstra. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Periode Januari – Februari 2018 (SOTK Lama)

**Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator serta Definisi Operasional Indikator Januari – Februari 2018 (SOTK lama)**

No.	Sasaran /Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebasdari Kesalahan Material	Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material

No.	Sasaran /Indikator	Definisi Operasional Indikator	
	2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja oleh Tim Evaluator Inspektorat	
2.	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Road Map RB	
3.	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	
4.	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	1. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	Nilai Skala 1 s.d. 12 pada komponen proses penguatan pengawasan oleh Tim Asesor PMPRB. Kegiatan penguatan pengawasan meliputi: a) Pengendalian Gratifikasi; b) Penelusuran Pengaduan Masyarakat; c) Pengendalian <i>Whistleblowing System</i> ; d) Penanganan Benturan Kepentingan; e) Pembangunan Zona Integritas; f) Implementasi WBK/WBBM.
		2. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	Dihitung dari kegiatan pengawasan yang dilakukan. Kegiatan pengawasan intern meliputi: a) Audit Operasional; b) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; c) Evaluasi LAKIP; d) Review Laporan Keuangan; e) Review RKAKL; f) Monev Tindak Lanjut.
		3. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	Data berasal dari persentase laporan hasil PM-EPITE dengan kategori minimal BAIK
5.	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM) BPK RI
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat	Dihitung dari tindak lanjut atas hasil pemeriksaan internal
6.	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	1. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	Indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah indikator pada level 3 (dari 93 indikator level 3), dengan level 2 sebagai <i>baseline</i>
7.	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	1. Persentase SDM Aparatur Inspektorat yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	Jumlah ASN Inspektorat yang memiliki kinerja dengan kriteria baik dibandingkan dengan seluruh ASN Inspektorat
		2. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan

No.	Sasaran /Indikator		Definisi Operasional Indikator
8.	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Mempertahankan ISO 9001:2008
9.	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat

## 2. Renstra SOTK Baru

**Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator serta Definisi Operasional Indikator Maret-Juli dan Agustus-Desember 2018 (SOTK baru)**

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Perentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah Untuk mengukur pencapaian Program Penguatan Pengawasan digunakan indikator-indikator: a. Penanganan Gratifikasi. b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). c. Penanganan Pengaduan Masyarakat. d. Penanganan Whistle Blowing System. e. Penanganan Benturan Kepentingan. f. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). h. <i>Fraud Control Plan</i>
				Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari 2 (dua) penilaian yaitu 1. Nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan 2. Nilai Pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM program pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Keandalan SPIP mitra kerja Inspektorat I dinilai dengan melaksanakan verifikasi terhadap pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE) Evaluasi pengendalian intern dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern secara umum pada tingkat unit kerja

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																		
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama																		
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>: Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>: <i>Adversed Opinion</i></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian	WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM		Persentase Capaian																		
		WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																		
WTP DPP	: Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																				
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian	95%																				
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																				
Tidak Wajar	: <i>Adversed Opinion</i>	50%																				
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%  Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI: <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>: Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>: Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran	Status 3	: Belum Tindak lanjut	Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah												
Status 1	: Tindak lanjut telah Sesuai Saran																					
Status 2	: Tindak lanjut Belum Sesuai Saran																					
Status 3	: Belum Tindak lanjut																					
Status 4	: Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah																					
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%																				
3	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat I																		

### 3. Revisi Renstra Tahun 2018

Pada tahun 2018 dalam upaya optimalisasi organisasi dan tata kerja Inspektorat I BPOM, dilakukan reviu terhadap Renstra Inspektorat yang telah disusun sebelumnya. Dari 9 (Sembilan) indikator yang dimiliki, Inspektorat I memandang perlu untuk adanya penyesuaian pada 5 (lima) indikator dengan 1 (satu) diantaranya adalah perubahan rumusan indikator. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya dipandang perlu mendapatkan penyesuaian target baik naik maupun turun. Revisi Renstra Inspektorat I dijabarkan pada **Lampiran 1**.

## **1) Perubahan Indikator**

- a) Berdasarkan hasil reviu Renstra Inspektorat, perlu diubah menjadi "Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja" dengan target 84% pada tahun 2018 dan 90% pada tahun 2019, tools yang digunakan adalah Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).
- b) Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan dan digunakan setidaknya-tidaknya sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Mengingat konsep maturitas organisasi membutuhkan penilaian dari eksternal (BPKP), maka kontrol terhadap capaian sepenuhnya ada pada pihak luar, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme pengukuran kontribusi dari Inspektorat I pada level maturitas SPIP BPOM yaitu melalui pengawasan pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasannya.
- c) Tools EPITE memberikan gambaran tentang lingkungan pengendalian pada tingkat entitas, dan diverifikasi oleh Inspektorat I serta diberikan perlakuan khusus berupa pendampingan dan kegiatan lainnya juga meningkatkan nilai SPIP, sehingga secara langsung berkorelasi pada semakin matangnya penerapan SPIP di satker dan berdampak langsung pada peningkatan level maturitas SPIP di BPOM. Target 84% dan 90% diperoleh dari analisis komprehensif terhadap nilai penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh satker yang pada umumnya berada dalam kisaran 78% sampai 100%. Semakin tinggi angka persentase pemenuhan EPITE, semakin matang pula pengendalian intern pada entitas tersebut.

## **2) Penyesuaian Target**

- a. Pada tahun 2018, Inspektorat I menetapkan target indeks kepuasan mitra sebesar 82, akan tetap nilai yang diperoleh adalah 77,67 dengan mekanisme pengumpulan dan pengolahan kuesioner oleh Bagian Tata Usaha. Mengingat target tahun sebelumnya belum tercapai, maka kenaikan target untuk tahun 2019 perlu disesuaikan, sebaiknya tetap sama dengan tahun 2018.

- b. Persentase target rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM disesuaikan dari 78% menjadi 80%. Potensi ini memberikan keyakinan untuk mencapai target pada 2019 sehingga target pada Renstra perlu ditingkatkan.
- c. Salah satu pengawasan intern oleh APIP adalah audit keuangan maupun kinerja yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada tahun 2018, capaian Inspektorat I secara khusus telah melebihi 90% dengan capaian Inspektorat Utama belum mencapai 87%. Pada tahun 2019, Inspektorat I merencanakan untuk audit kinerja sesuai Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.01.1.22.08.18.4119 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan BPOM, serta audit operasional pada seluruh unit kerja objek pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017. Hal ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya sehingga belum diperoleh pola tindak lanjut rekomendasi yang optimal. Dengan demikian, hasil reuiu untuk indikator ini adalah dengan tidak meningkatkan target, melainkan tetap sama dengan target tahun 2018.
- d. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari marwah Reformasi Birokrasi yang selalu menjadi fokus dari jalannya pemerintahan. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah 78 atau kategori BB, sedangkan target pada 2019 adalah 81 atau kategori A. Walaupun capaian tahun 2018 belum mencapai target, namun peningkatan target pada tahun 2019 merupakan tuntutan organisasi untuk memperoleh nilai SAKIP diatas kategori BB yang telah diperoleh selama 2 tahun terakhir. Peningkatan level ini menjadi kewajiban seluruh unit kerja di BPOM dan akan dapat diakselerasi melalui implementasi SKP *Online* dan *e-performance* pada tahun 2019.

#### A1. Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Dukungan tersebut

diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat I sebagai berikut :

**Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa**

**Gambar 7. Visi Inspektorat I Badan POM**

Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat I Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

**A2. Misi**

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat I Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat I Badan POM. Inspektorat I menetapkan misi sebagai berikut:

- 1** Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- 2** Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan
- 3** Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

**Gambar 8. Misi Inspektorat I Badan POM**

Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good*

*governance* agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat I secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi serta meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

### A3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat I Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat I Badan POM adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Tujuan dan Indikator Tujuan

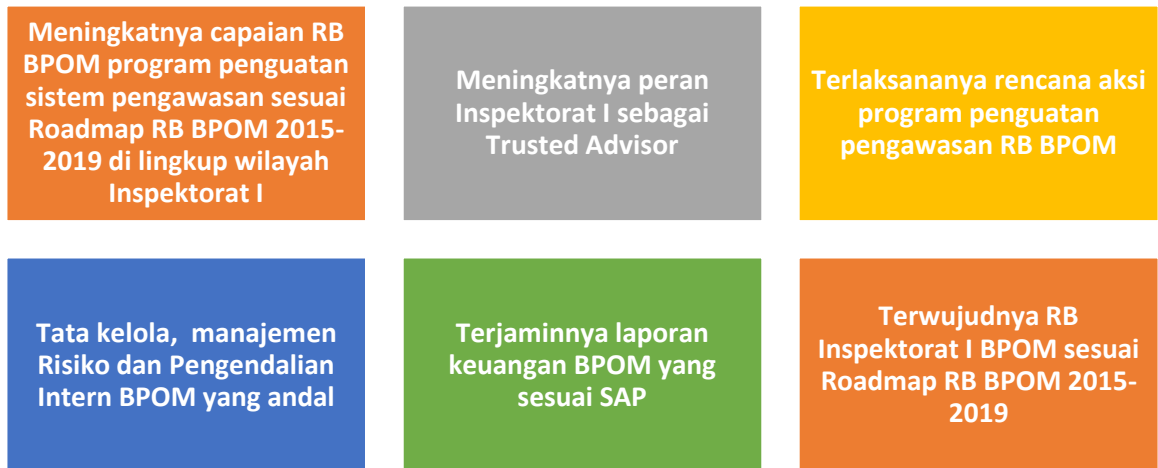
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat I melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat I memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penerapan

sistem pengendalian manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

#### A4. Sasaran

Sasaran Inspektorat I merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian Sasaran Strategis Inspektorat I sebagai berikut :



Gambar 10. Sasaran Strategis Inspektorat I

Adapun pengukuran pencapaian sasaran menggunakan indikator-indikator dengan kriteria ukuran keberhasilan yang baik yakni **Specific** (tidak berdwimakna), **Measureable** (dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya), **Achievable** (dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (*controllable*), **Relevance** (terkait langsung

dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur), **Timebound** (mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu, dan **Cukup** (dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator sebagaimana tersaji dibawah ini :

**Tabel 4. Definisi Operasional Indikator**

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
1.	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.
2.		Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama
3	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	Program Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah Untuk mengukur pencapaian Program Penguatan Pengawasan digunakan indikator-indikator: i. Penanganan Gratifikasi. j. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). k. Penanganan Pengaduan Masyarakat. l. Penanganan Whistle Blowing System. m. Penanganan Benturan Kepentingan. n. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). o. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). p. <i>Fraud Control Plan</i>  Nilai RB BPOM program penguatan pengawasan dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN terdiri dari 2 (dua) penilaian yaitu:
				1. Nilai pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan 2. Nilai Pencapaian Reformasi Birokrasi BPOM program pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Dihitung dari : (jumlah realisasi rencana aksi/jumlah rencana aksi) x 100%

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator																								
4		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Keandalan SPIP mitra kerja Inspektorat I dinilai dengan melaksanakan verifikasi terhadap pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM EPITE). Evaluasi pengendalian intern dilaksanakan dengan cara melakukan penilaian terhadap penerapan unsur-unsur pengendalian intern secara umum pada tingkat unit kerja																								
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat Utama																								
5		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri dari: <table border="1" data-bbox="1066 703 1516 1189"> <thead> <tr> <th colspan="3">Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM</th> <th>Persentase Capaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>:</td> <td>WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>WTP DPP</td> <td>:</td> <td>Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>WDP</td> <td>:</td> <td>Wajar Dengan Pengecualian</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>TMP</td> <td>:</td> <td>Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>:</td> <td>Adversed Opinion</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian	WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%	WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%	WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%	TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%	Tidak Wajar	:	Adversed Opinion	50%
			Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM			Persentase Capaian																						
			WTP	:	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik)	100%																						
WTP DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas	97%																									
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian	95%																									
TMP	:	Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer)	75%																									
Tidak Wajar	:	Adversed Opinion	50%																									
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100%  Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI: <table border="1" data-bbox="1066 1368 1516 1547"> <tbody> <tr> <td>Status 1</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut Belum Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 3</td> <td>:</td> <td>Belum Tindak lanjut</td> </tr> <tr> <td>Status 4</td> <td>:</td> <td>Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah</td> </tr> </tbody> </table>	Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	:	Tindak lanjut Belum Sesuai Saran	Status 3	:	Belum Tindak lanjut	Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah															
Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran																										
Status 2	:	Tindak lanjut Belum Sesuai Saran																										
Status 3	:	Belum Tindak lanjut																										
Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjut dengan alasan yang sah																										
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%																											
6	<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I																								

#### A5. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat I Badan POM telah menetapkan kebijakan-kebijakan

yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu “Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien” sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen resiko di lingkungan Badan POM.
- b. Pengembangan pengawasan intern berbasis teknologi informasi dan penggunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern;
- d. Penguatan pelaksanaan RB dan budaya anti korupsi untuk mewujudkan aparatur yang berkinerja dan berintegritas

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka Inspektorat I Badan POM menyusun strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus bagi Inspektorat I yaitu:

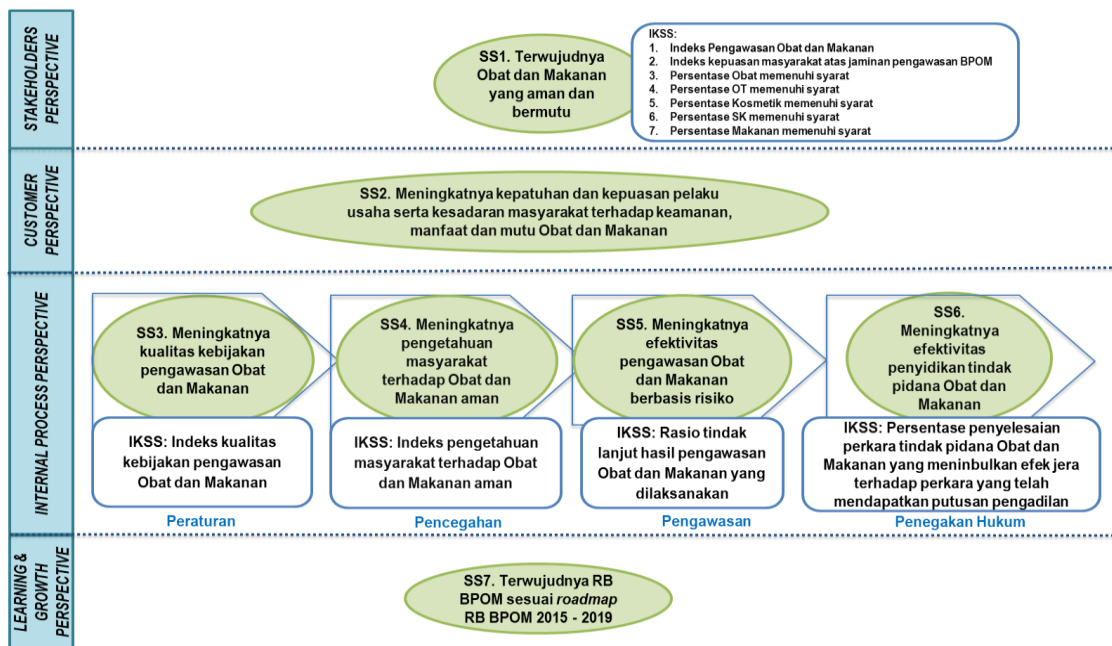
1. Melakukan pengawalan program “ lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”.
2. Meningkatkan efektifitas *Three Lines of Defences*.
3. Mempertahankan maturitas SPIP level 3.
4. Bersinergi dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Resiko.
5. Meningkatkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur.
6. Otomasi dalam pelaksanaan pengawasan intern.
7. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*.
8. Mempertahankan Kapabilitas APIP Level 3.
9. Pemenuhan dalam persyaratan Piagam Pengawasan Intern.
10. Melakukan pembentukan Komite Audit untuk mengawasi kinerja Inspektorat I.
11. Melakukan pengawalan peningkatan mutu pelayanan publik.
12. Membangun gerakan nasional sapu bersih pungutan liar.
13. Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

## A6. Program

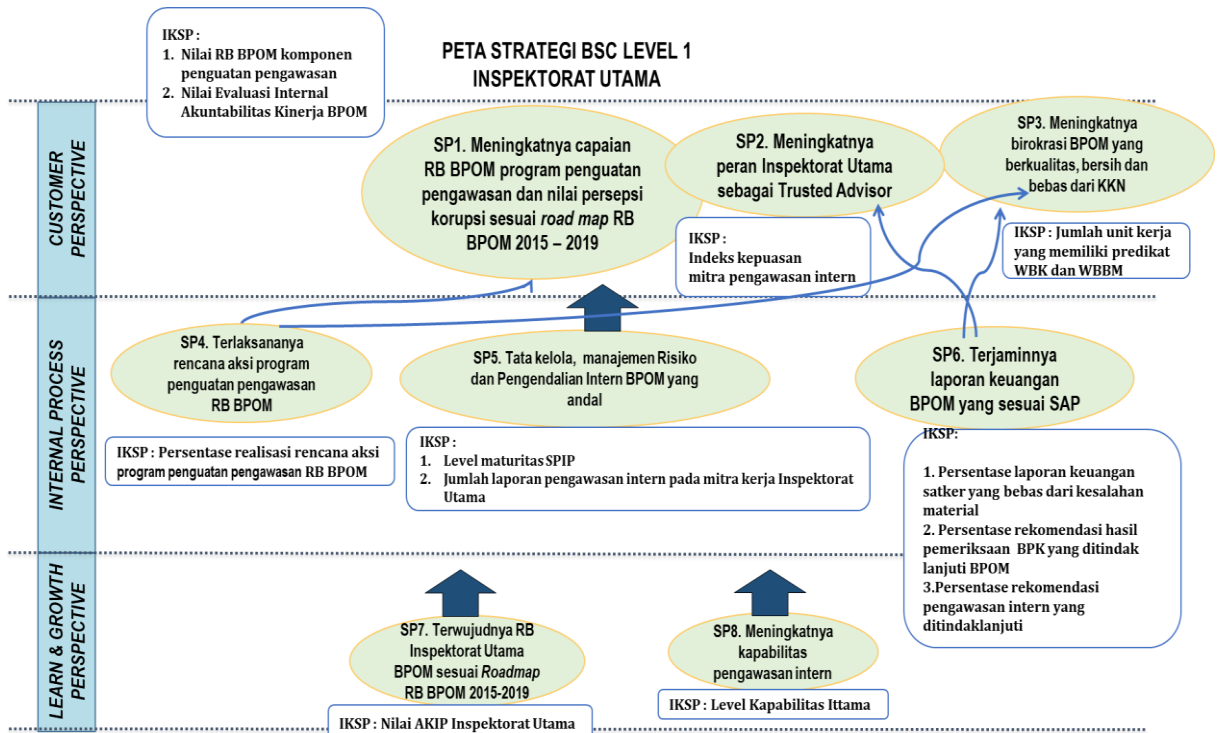
Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat I dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain :

- ❖ Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I.
- ❖ Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- ❖ Peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM.
- ❖ Pengawasan komponen hasil RB dan penguatan sistem pengawasan.
- ❖ Implementasi Quality Management System.
- ❖ Operasional pengawasan Intern Inspektorat I.
- ❖ Manajemen pengawasan Intern Inspektorat Utama.

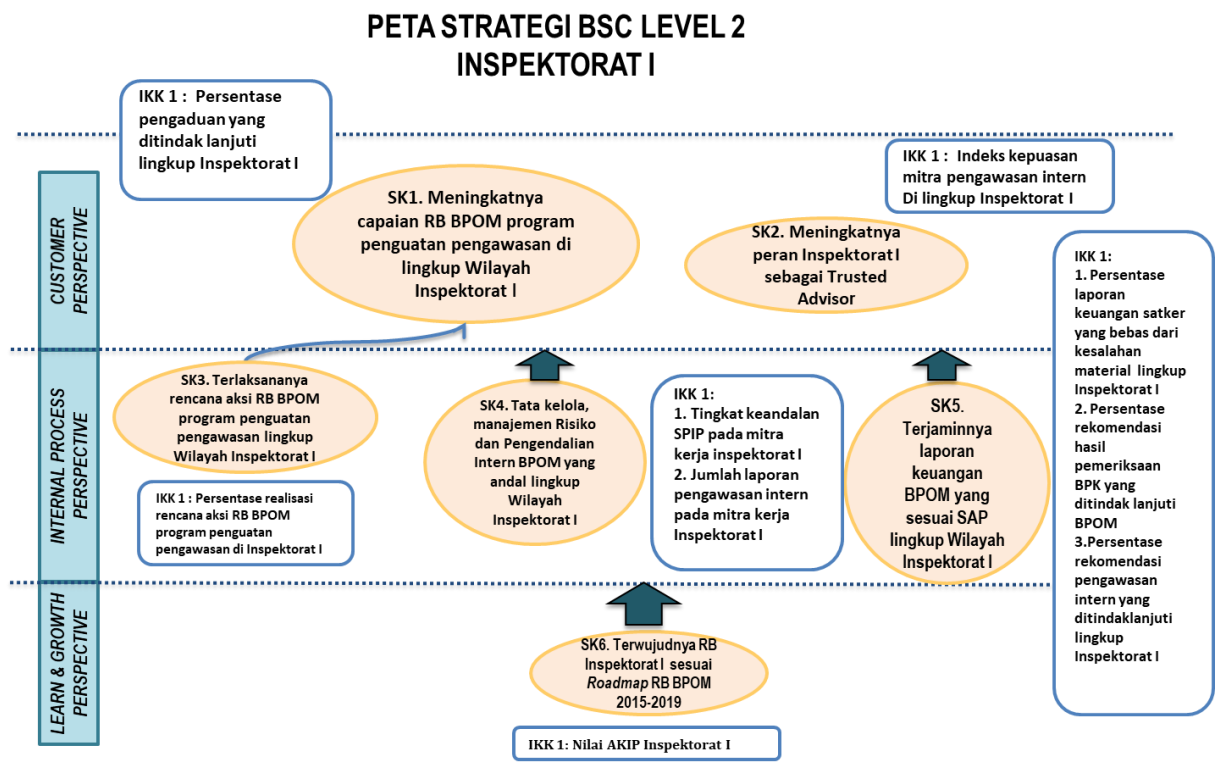
PETA STRATEGI BSC LEVEL 0 KEPALA BPOM RI – EXISTING (2019)



Gambar 11. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Kepala Badan POM



Gambar 12. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat Utama



Gambar 13. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Inspektorat I

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat I Badan POM telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2019 yang telah disahkan. Perjanjian Kinerja Inspektorat I serta Indikator Kinerja Utama yang telah disahkan terdapat pada **lampiran 2 dan Lampiran 3.**

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Badan POM**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90%
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80%
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%			
3	<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	81

Inspektorat I mendapat alokasi anggaran dalam bentuk kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I sebesar Rp7.436.030.000, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6. Anggaran Inspektorat I Badan POM Tahun 2019 per Sasaran**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan pengawasan dan nilai persepsi korupsi sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015 – 2019	150.660.000
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	458.252.000
3	Terlaksananya rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM Program penguatan system pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	69.173.000
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	1.041.280.000
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	3.285.358.000
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	2.431.307.000
<i>Total Anggaran</i>		<b>7.436.030.000</b>

### C. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Gambar 14. Rumus Perhitungan Persentase Capaian**

Pengukuran efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut: Jika  $IE > SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap efisien. Jika  $IE < SE$ , maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja:

Sangat Kurang	• < 50
Kurang	• 50 - < 70
Cukup	• 70 - < 90
Baik	• 90 - < 110
Sangat Baik	• 110-120
Tidak dapat disimpulkan	• > 120

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM mengamanatkan Inspektorat Utama dengan 2 (dua) unit Eselon II di bawahnya Inspektorat Utama yakni Inspektorat I dan II serta diferensiasi yang utama pada wilayah pengawasan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Inspektorat I memiliki 6 (enam) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Pencapaian kinerja Inspektorat I selama tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat I Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>							
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80%	88,89%	111,11%	111,11%	Sangat Baik
2	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,79	99,74%	99,74%	Baik
<i>Internal Process Perspective</i>							
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	100%	108,69%	108,69%	Baik
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90%	82,36%	91,51%	95,76%	Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria
	B POM yang Andal di wilayah Inspektorat I	5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	23	100%		Baik
5	Terjaminnya laporan keuangan B POM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	108,03%	Baik
		7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti B POM	80%	94,24%	117,80%		Sangat Baik
		8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	90,33%	106,28%		Baik
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
6	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB B POM 2015-2019	9. Nilai AKIP Inspektorat I	81	78,14	96,47%	96,47%	Baik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), 2 (dua) IKU dengan kriteria pencapaian “**Sangat Baik**” dan 7 (tujuh) IKU dengan kriteria pencapaian “**Baik**”.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat I tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat I adalah sebesar 102,36. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**Tabel 8. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card***

Perspektif	Bobot	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Sasaran Program tiap Perspektif	Nilai (Bobot x Nilai Sasaran Program tiap Perspektif)
Customer	40%	Meningkatnya capaian RB B POM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB B POM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	111,11%	105,43%	42,17

Perspektif	Bobot	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Sasaran Program tiap Perspektif	Nilai (Bobot x Nilai Sasaran Program tiap Perspektif)
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	99,74%		
Internal Process	30%	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	108,69%	104,16%	31,25
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di wilayah Inspektorat I	95,76%		
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	108,03%		
Learning & Growth	30%	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	96,47%	96,47%	28,94
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>					<b>102,36</b>

Tabel diatas menyajikan informasi Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan *Perspektif Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap *Perspektif* pada tahun 2019 sebesar 102,36% yang terdiri dari Nilai Kinerja *Perspektif Customer* (105,43%); Nilai Kinerja *Perspektif Internal Process* (104,16%) dan Nilai Kinerja *Perspektif Learning & Growth* (96,47%).

Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Setelah dilakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dengan *Perspektif Customer* dengan bobot 40%, *Perspektif Internal Process* dengan bobot 30% dan *Perspektif Learning & Growth* dengan bobot 30%, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi adalah sebesar 102,36. Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat I tahun 2018 dan 2019 serta Inspektorat sebelum peningkatan eselonisasi tahun 2015 - 2017 sebagai berikut:

**Tabel 9. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2015 -2019 Berdasarkan Perspektif**

*Balance Score Card*

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi
2019	102,36
2018	102,77
2017	105,18
2016	104,44
2015	98,88

Pada tahun 2018, Badan POM mengalami perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Inspektorat Utama mengalami peningkatan eselonisasi menjadi setingkat eselon I (Inspektorat Utama). Perubahan struktur organisasi berpengaruh pula pada perubahan perencanaan strategis, perubahan peta strategis dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa Indikator Kinerja Utama tidak lagi mengukur output, namun mengukur capaian *outcome* dan *un-controllable*.

Penurunan Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 disebabkan karena terdapat penurunan pencapaian pada Sasaran program “Meningkatnya capaian RB BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan sesuai *Road Map* RB BPOM 2015–2019” dengan indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan” yang mempunyai capaian sebesar 111,11% pada tahun 2019 dan 122,44% pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena penyesuaian target pada Indikator tersebut sesuai dengan revisi renstra tahun 2018 yang awalnya 70% menjadi 80% .

Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat I tahun 2019 secara detil akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

## A.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan mengenai masing-masing sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Capaian Sasaran Program 1 - Meningkatnya Capaian Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di Lingkup Wilayah Inspektorat I

Dalam kerangka evaluasi Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP.

Sasaran Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I diukur menggunakan indikator kinerja :

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan.

Adapun definisi operasional indikator “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan”:

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.

Cara perhitungan capaian indikator :

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan}}{\text{jumlah Jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan}} \times 100\%$$

Tabel 10. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	N/A	85.71%	80%	88.89%	111.11%	N/A	103.71%	80%	111,11%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 1 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “**Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan**” tahun 2019 sebesar 88,89%, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian indikator adalah sebesar 111,11% atau masuk kriteria “**Sangat Baik**”.

Pada tahun 2019, dari 9 pengaduan berkadar pengawasan yang diterima sebanyak 8 pengaduan telah ditindaklanjuti dengan penelusuran. Dari 9 pengaduan tersebut, sebanyak 8 penelusuran telah selesai dilaksanakan dengan hasil 3 pengaduan terbukti pada BPOM di Manokwari, Loka Kotawaringin Barat dan Balai POM di Palu dan 5 pengaduan tidak terbukti pada Balai Besar POM Jakarta, Makassar, Palembang, Bandung dan Makassar. Adapun 1 pengaduan lain belum dilakukan penelusuran hingga akhir Tahun Anggaran 2019 pada Balai Besar di POM Jakarta.

Terhadap 3 pengaduan berkadar pengawasan yang terbukti, telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan muatan pengaduan, antara lain berupa pembinaan, penerapan sanksi, hingga pada pembuatan prosedur baru.



Gambar 15. Hasil Penelusuran Pengaduan Tahun 2019

Capaian tahun 2019 ini telah berada di atas target pada Renstra/RPJMN, namun mengingat capaian pada sasaran ini sangat tergantung pada jumlah maupun urgensi pengaduan yang masuk serta faktor-faktor lainnya, maka perlu diperhatikan agar pencapaiannya pada periode Renstra 2020 – 2024 tetap sesuai target.

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja tahun 2019 lebih baik dari realisasi tahun 2018 dengan perbandingan sebesar 103,71%, namun indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2015-2019 karena indikator tersebut baru terdapat pada revisi renstra tahun 2018.

➤ **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

Tabel 11. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 1 dengan Unit sejenis

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Inspektorat I	80%	88,89%	111,11
	Inspektorat II	75%	100,00%	133,33

➤ **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor keberhasilan untuk sasaran ini adalah sebagai berikut:

- Penatalaksanaan disposisi secara optimal pada pengaduan yang masuk terutama untuk pengaduan yang berkadar pengawasan, sehingga setiap pengaduan dapat segera ditindaklanjuti oleh auditor.
- Penganggaran yang memadai, terutama untuk dilakukannya penelusuran pengaduan di Balai Besar/Balai POM.
- Meningkatkan kerjasama dengan Biro Umum dan Biro Hukum dan Organisasi dalam penegakan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti melanggar.
- Auditor yang ditunjuk menangani penelusuran pengaduan sudah mengikuti pelatihan audit investigasi yang mendukung sasaran ini.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah adanya pengaduan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja lain, seperti Biro Umum dan SDM serta Biro Hukum dan Organisasi. Terhadap kendala tersebut, Inspektorat I melakukan koordinasi secara optimal sehingga hasil penelusuran pengaduan dapat ditindak lanjuti dan data yang bersifat rahasia dapat dikelola bersama-sama dengan baik.

**2. Capaian Sasaran Program 2 - Meningkatnya Peran Inspektorat I sebagai *Trusted Advisor***

Inspektorat I merupakan salah satu produk pengembangan organisasi BPOM sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengubah struktur Inspektorat dari level Eselon II menjadi Inspektorat Utama pada level Eselon I. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Inspektorat Utama membawahi 2 (dua) unit Eselon II yakni Inspektorat I dan Inspektorat II. Pada saat posisi Inspektorat masih pada Level Eselon II, dilakukan pengukuran sasaran “**Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan**” yang paralel dengan sasaran “**Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai *Trusted Advisor***” pada Inspektorat I sebagai elemen Inspektorat Utama.

Indikator kinerja yang ditetapkan pada struktur organisasi sebelumnya adalah ‘Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal “Baik”, yang merupakan kumulatif dari penilaian terdiri atas 12 aspek terkait kompetensi auditor, 3 aspek terkait etika dan perilaku, serta 2 aspek terkait rekomendasi audit.

Sasaran Meningkatnya Peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor diukur menggunakan indikator kinerja:

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern

Adapun definisi operasional indikator “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern”:

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Pengukuran tingkat keberhasilan tersebut dilakukan melalui survei menggunakan skala 1 s.d 5 untuk setiap pertanyaan.

Adapun Aspek komponen pertanyaan merupakan unsur Quality Service:

- Wujud Fisik (*Tangible*)
- Keandalan (*Reability*)
- Kesigapan (*Responsiveness*)
- Jaminan (*Assurance*)
- Empati (*Emphaty*)

Cara perhitungan capaian indikator:

1. Survei dilaksanakan secara acak dengan mengirimkan kuesioner kepada Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja.
2. Responden mengisi untuk setiap pertanyaan yang diberikan.
3. Pengisian jawaban menggunakan skala likert 1 s.d 4.
4. Dilakukan perhitungan dan rekapitulasi nilai.
5. Nilai rata-rata x 20.
6. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern (*Trusted Advisor*).

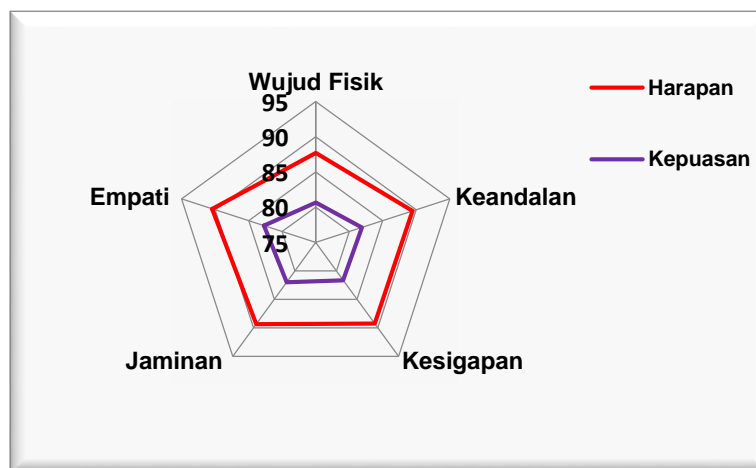
$$\frac{\text{Rata – rata komulatif nilai wujud fisik layanan (tangible), keandalan layanan (reliability), kesigapan (responsiveness), jaminan (assurance) dan empati}}{\text{jumlah keseluruhan unsur}}$$

**Tabel 12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	N/A	76.27	82	81.79	99,74%	N/A	107.27%	82	99.74%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke - 2 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja '**Indeks kepuasan mitra pengawasan intern**' tahun 2019 adalah 81,79, bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian indikator adalah sebesar 99,74% atau masuk kriteria "**Baik**". Demi menjaga independensi survei, pengelolaan survei kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Rincian Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2019 dapat dilihat pada **lampiran 4** dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 16. Hasil Survei Kepuasan Mitra Inspektorat I Tahun 2019

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator tahun 2019 lebih baik dari realisasi tahun 2018 dengan perbandingan sebesar 107,27% dan bila dibandingkan dengan RPJMN tahun 2019 adalah 99,74%. Namun tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya pada periode renstra 2015-2019, karena perbedaan *tools* survei.

Survei dilakukan berdasarkan 5 aspek yakni wujud fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), kesigapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan empati (*empathy*). Hasil survey tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 terdapat *re-design* pada *tools* survei dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu:

PERBEDAAN TOOLS SURVEI KEPUASAN MITRA		
PERUBAHAN	2018	2019
 Responden	Kepala Unit Kerja	ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama
 Fokus Pertanyaan	Fokus pertanyaan pada pelayanan audit	Fokus pertanyaan pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya
 Skala Likert	1-5	1-4
 Aspek	Hanya mengukur kepuasan atas layanan yang telah diberikan	Mengukur kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden

Gambar 17. Perbedaan Tools Survei Kepuasan Mitra Tahun 2018 dan 2019

- **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

Tabel 13. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 2 dengan Unit sejenis

Indikator		Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks mitra intern	kepuasan pengawasan	Inspektorat I	82	81,79	99,74
		Inspektorat II		81,07	98,86

➤ **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan**

Hasil survei kepuasan mitra tahun 2019 dengan nilai yang paling rendah pada aspek wujud fisik (*tangible*) yang meliputi variabel indikator sebagai berikut :

- Kurangnya sarana dan prasarana (ruangan fasilitas) dalam pemberian layanan di Inspektorat Utama
- Aplikasi Simolekdesi belum optimal dalam membantu tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan hasil audit Inspektorat Utama.
- Aplikasi Solusi belum optimal dalam membantu pemberian layanan konsultasi oleh Inspektorat Utama.

Terhadap hasil survei tersebut, Inspektorat I telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

- Adanya ruangan (fasilitas) dalam pemberian layanan di Inspektorat I, peningkatan layanan konsultasi/*helpdesk* yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi dan penoptimalisasian aplikasi untuk konsultasi.
- Sosialisasi aplikasi Simolekdesi sebagai kemudahan tindak lanjut hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja.
- Peningkatan layanan konsultasi melalui Aplikasi Solusi dengan memberikan layanan konsultasi tidak melebihi *timeline*.
- Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspos hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM untuk transfer *knowledge* dan *sharing information* antara Inspektorat I dan Inspektorat II serta perbaikan sistem secara menyeluruh di lingkup pengawasan Inspektorat Utama.
- Pertemuan bulanan dalam rangka Konsolidasi dan rekonsiliasi data hasil pengawasan inspektorat Utama

**3. Capaian Sasaran Program 3 - Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I**

Secara rutin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi baik pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Pemerintah, termasuk di dalamnya BPOM sebagai entitas yang mengelola APBN.

Siklus kegiatan diawali dengan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk periode tahun 2018 dan semester I tahun 2019, sebagai instrumen pengukuran kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri dengan prinsip *self-assessment* yang diselenggarakan oleh asesor BPOM terhadap 8 (delapan) area perubahan untuk kemudian isian tersebut dievaluasi oleh Kementerian PAN dan RB.



Gambar 18. Delapan Area Perubahan Yang Diselenggarakan Asesor BPOM

Inspektorat Utama menjadi penanggung jawab area perubahan penguatan pengawasan sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Road Map RB Badan POM Tahun 2019. Bidang ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme di lingkungan BPOM. Sebagaimana dijelaskan pada sasaran strategis yang pertama, bidang penguatan pengawasan meliputi 7 hal yaitu: 1) Pengendalian Gratifikasi, 2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3) Penelusuran Pengaduan Masyarakat, 4) *Whistleblowing system*, 5) Penanganan Benturan Kepentingan, 6) Pembangunan Zona Integritas, dan 7) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Seiring dengan kebutuhan organisasi, indikator yang terkait dengan Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan penekanan pada realisasi terhadap rencana aksi RB BPOM. Indikator ini cenderung lebih berorientasi *outcome* dibandingkan indikator sebelumnya, karena salah satu aspek penting dalam evaluasi RB adalah rencana aksi yang dibuat sebagai tindak lanjut hasil evaluasi. Aksi yang dilakukan diharapkan memberikan dampak yang sistematis terhadap peningkatan implementasi RB di lingkungan BPOM terutama pada area penguatan sistem pengawasan.

Sasaran Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I diukur menggunakan indikator kinerja:

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan

Adapun definisi operasional indikator “Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan”:

Serangkaian rencana tindakan tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan RB, dan memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh tim pelaksana RB dengan membuat rencana aksi dan tindak lanjutnya

Cara perhitungan capaian indikator:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Jumlah Rencana Aksi}} \times 100\%$$

Tabel 14. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	N/A	90%	92%	100%	108,69%	N/A	111,11%	92%	108,69%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke - 3 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “**Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan**” mencapai 100% atau melebihi target yang diperjanjikan pada akhir periode renstra atau capaian indikator sebesar 108,69% dengan kriteria “**Baik**”, dengan realisasi rencana aksi sebagai berikut :

Tabel 15. Realisasi Rencana Aksi RB Program Penguatan Sistem Pengawasan

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
a. Laporan Keuangan Badan POM disusun dengan andal.	Mempertahankan Opini WTP	Implementasi kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan Intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum	Pertemuan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM	Lokakarya efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha di Surabaya dan Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM sebagai Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Kinerja BPK RI di Badan POM
		Implementasi kebijakan untuk mendorong Peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan	Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan intern per triwulan
			Monitoring dan Evaluasi hasil pemeriksaan eksternal	Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan eksternal per semester.

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
	Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Pendampingan penyusunan laporan keuangan Satker	Reviu laporan keuangan	Reviu Laporan Keuangan BPOM tahun 2018, Semester I dan TW III tahun 2019.
		Bimtek pelaporan keuangan	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) satker pusat dan BB/BPOM pada bulan Mei 2019</li> <li>- Tersusunnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PI.03.01.1.71.05.19.1779 Tahun 2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan POM</li> </ul>
		Peningkatan kompetensi auditor terkait pengelolaan anggaran	Pendidikan dan Pelatihan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Pembuat Komitmen</li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengadaan Barang/Jasa yang diikuti oleh Auditor Inspektorat I Badan POM
		Penyusunan Peraturan Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun PerBPOM tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM</li> <li>- Menyusun KepKaBPOM tentang Pembentukan Tim Majelis, Tim Penyelesaian dan Tim Sekretariat, Penyelesain Kerugian Negara di Lingkungan BPOM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PerBPOM Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan BPOM</li> <li>- Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.11.18.5307 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Majelis Penyelesain Kerugian Negara, Tim Penyelesain Kerugian Negara dan Tim Sekretariat, Penyelesain Kerugian Negara di Lingkungan BPOM</li> <li>- Pelaporan pemantauan penyelesaian TGR semester I dan semester II tahun 2019</li> </ul>
b. Implementasi program anti KKN	Penanganan gratifikasi	Sosialisasi Gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi	Sosialisasi anti gratifikasi melalui banner, kartu e-money dan flashdisk
		Pelaporan Gratifikasi	Monitoring dan Evaluasi pelaporan gratifikasi	Jumlah laporan penerimaan gratifikasi s.d triwulan IV tahun 2019
	Pengaturan konflik kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Rapat sosialisasi benturan kepentingan kepada CPNS
	Saber Pungli	Sosialisasi Saber Pungli	Sosialisasi Saber Pungli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Campaign</i> pada saat <i>car free day</i>, orientasi CPNS</li> <li>- Pelaporan kegiatan saber pungli</li> </ul>
c. Penguatan Sistem Pengawasan Intern	Penerapan Sistem Pengendalian Internal	Evaluasi pengendalian Intern tingkat entitas (EPITE)	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM	Evaluasi kepatuhan implementasi PM EPITE Unit Kerja dan BB/BPOM pada bulan Desember 2019.

Hasil Yang Diharapkan	Ukuran Keberhasilan	Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	
			Rencana	Realisasi
Pemerintah (SPIP)	Pemerintah (SPIP) di seluruh unit kerja	Pengembangan aplikasi : - Simolekdesi berkinerja (Sistem Monitoring secara Elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja) - Solusi (Saluran Online Layanan Konsultasi) - Si Tampan Adi (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Intern dan Pustaka Audit)	Pengembangan aplikasi - Penambahan modul evaluasi SAKIP, reviu pengelolaan keuangan, pengolahan SKM dan manrisk pada Simolekdesi - Aplikasi web based untuk layanan konsultasi Inspektorat - Aplikasi e-audit	Pengembangan aplikasi : - simolekdesi versi ( <a href="http://www.simolekdesiversi2.pom.go.id">www.simolekdesiversi2.pom.go.id</a> ) - <a href="http://www.solusi.pom.go.id">www.solusi.pom.go.id</a> - <a href="http://www.sitampnadi.pom.go.id">www.sitampnadi.pom.go.id</a>
		Menyusun Pedoman Penilaian Maturitas Unit Kerja di Lingkungan BPOM	Rancangan Pedoman Penilaian Maturitas Unit Kerja di Lingkungan BPOM	Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Penilaian Maturitas SPIP Unit Kerja di Lingkungan Badan POM

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018 dengan perbandingan sebesar 111,11% , namun tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2017 karena perbedaan indikator kinerja dan cara pengukurannya. Indikator kinerja tahun 2017 adalah “Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB” dengan realisasi sebesar 88.70%.

➤ **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “ Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

Tabel 16. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 3 dengan Unit sejenis

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	Inspektorat I	92%	100%	108,69%
	Inspektorat II		100%	108,69%

➤ **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kunci keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain :

4. Tindak lanjut terhadap Road Map RB Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015.
5. Penerapan manajemen resiko yang telah terintegrasi dalam sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
6. Monitoring dan pelaksanaan SPIP secara terus menerus dan berkelanjutan.
7. Pada tahun 2019 telah tersusun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PI.03.01.1.71.05.19.1779 Tahun 2019 tentang Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan POM sebagai pengendalian atas peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
8. Perubahan mekanisme kerja, *mind set* dan *culture set* pegawai secara sistematis dan konsisten untuk menjadi lebih baik.

**4. Capaian Sasaran Program 4 - Tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I**

Revitalisasi peran APIP yang tidak lagi sekadar *watchdog*, melainkan mitra kerja untuk peran *assurance and consulting*, serta yang terkini sebagai *trusted advisor* menjadikan Inspektorat I perlu masuk ke 3 aspek sekaligus dalam pengelolaan organisasi, yakni *governance*, *risk management*, dan *internal control*.

Tata kelola organisasi yang baik dalam perspektif modern pada prinsipnya bisa dikerucutkan dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik. Pada instansi pemerintah, pengendalian intern telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Rincian capaian untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	N/A	92.5%	90%	82.36%	91.51%	N/A	89.04%	90%	91.51%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	N/A	21	23	23	100%	N/A	109.52%	23	100%

**a. Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, instansi pemerintah diamanatkan untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai alat bantu dalam penerapan pengendalian intern, maka sejak beberapa tahun terakhir, Inspektorat mengembangkan Penilaian Mandiri Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) yang merupakan instrumen untuk menilai tingkat keandalan SPIP tingkat entitas yang diadaptasi dari *best practice* pada beberapa instansi lain yang memiliki maturitas SPIP lebih tinggi seperti Kementerian Keuangan. Pada Kementerian Keuangan sendiri, pelaksanaan EPITE telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan EPITE melalui konsep penilaian mandiri atau *self-assessment*, merupakan konsep yang dikembangkan oleh Inspektorat BPOM Pada Tahun 2015 dan diimplementasi lebih luas oleh Inspektorat Utama BPOM sebagai unit Eselon I baru sesuai amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2017. Pengembangan selanjutnya adalah PM-EPITE dalam jaringan berupa aplikasi teknologi informasi (TI) berbasis web untuk kemudahan pelaksanaan evaluasi pengendalian internal di lingkungan Badan POM.

Dari hasil evaluasi terhadap PM-EPITE ini akan diperoleh kesimpulan mengenai keandalan pengendalian intern tingkat entitas, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan dan selanjutnya dikategorikan ke dalam tiga tingkatan yaitu tingkat keandalan rendah (nilai akhir 0% s.d. 50%), tingkat keandalan sedang (nilai akhir 51% s.d. 80%), dan tingkat keandalan tinggi (nilai akhir 81% s.d. 100%).

Adapun definisi operasional indikator “Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja”:

Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja merupakan suatu kondisi yang menggambarkan baiknya sistem pengendalian intern di unit kerja ditinjau dari lima unsur sistem pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang telah diverifikasi oleh APIP.

Cara perhitungan capaian indikator :

Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP.

**Tabel 18. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-1**

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)=(5)/(2)	(8) = (5)/(3)	(8)	(9)= (5)/(8)
Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	N/A	92.7%	90%	82.36%	91.51%	N/A	89.04%	90%	91.51%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 4 indikator Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja yang diukur dari persentase hasil Penilaian Mandiri Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PM-EPITE) realisasi tahun 2019 adalah 82,36%. bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian indikator adalah sebesar 91,51% atau

masuk kriteria **“Baik”**. Pelaksanaan PM-EPITE tahun 2019 dilaksanakan dengan cara mengevaluasi kertas kerja PM-EPITE yang telah diberikan oleh unit kerja wilayah Inspektorat I.

Realisasi kinerja sebesar 82,36% berada dibawah target yang ditetapkan yakni 90%, dengan rincian hasil PM-EPITE dapat dilihat pada **lampiran 5**.

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator kinerja tahun 2019 menurun dari realisasi 2018 dengan perbandingan sebesar 89,04%. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi tahun 2017. Pada tahun 2017 indikator kinerjanya adalah ‘Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria “BAIK” dengan realisasi 95,00%.

➤ **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

**Tabel 19. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 4 dengan Unit sejenis**

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Inspektorat I	90%	82,36%	91,51
	Inspektorat II	85%	79,00%	92,94

➤ **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan**

Capaian untuk sasaran ini tidak mencapai target disebabkan oleh :

- a) Satuan tugas SPIP selaku personil melaksanakan *self assessment* belum dapat melaksanakan penilaian dengan independen dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh hampir seluruhnya dalam kategori tinggi namun pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim dari Inspektorat I terjadi penurunan karena terdapat unit kerja yang tidak menjelaskan data dukung yang sesuai.
- b) Tahun 2018 Verifikasi PM-EPITE dilaksanakan oleh auditor internal QMS yang juga merupakan bagian dari suatu unit kerja

yang dapat peran regulernya juga merupakan pelaksana kegiatan sehari-hari pada unit tersebut sehingga belum cukup objektif dalam melaksanakan verifikasi namun pada tahun 2019 verifikasi dilakukan oleh auditor dari Inspektorat I.

Mengingat pentingnya implementasi SPIP pada penyelenggaraan kegiatan, maka Inspektorat I melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Inspektorat II dalam hal intervensi pengukuran dan pengumpulan PM-EPITE, sehingga unit kerja mengirimkan hasil penilaian dengan data dukung yang sesuai.
- Melakukan verifikasi bersamaan dengan proses kegiatan pengawasan yang diselenggarakan pada unit kerja yang berada di lingkup wilayah Inspektorat I sehingga bisa mendapatkan data dukung untuk verifikasi yang lebih lengkap.

#### **b. Jumlah Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja**

Indikator ini digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat I pada bidang pengawasan intern melalui perhitungan jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat I sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang meliputi Audit Operasional, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Evaluasi SAKIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Reviu atas Pelaksanaan Realisasi Anggaran, serta Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam status sebagai Inspektorat pada level Eselon II, indikator yang terkait dengan laporan hasil pengawasan didefinisikan sebagai “Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu”.

Adapun definisi operasional indikator “Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja”:

Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat I

Cara perhitungan capaian indikator:

Jumlah total laporan hasil pengawasan intern

Tabel 20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4 Indikator ke-2

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)=(5)/(2)	(8) = (5)/(3)	(8)	(9)= (5)/(8)
Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	N/A	21	23	23	100%	N/A	109.52%	23	100%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 4 indikator jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja. Pada tahun 2019, Inspektorat I menyelesaikan 23 laporan atau bila dibandingkan dengan target, capaian indikator sebesar 100% atau masuk kriteria **Baik**.

Sebanyak 23 laporan pengawasan intern pada mitra kerja terdiri dari :

a) Kegiatan Audit

Kegiatan audit yang dilakukan oleh Inspektorat I pada unit kerja yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Inspektorat I sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017 menghasilkan 16 laporan yang terdiri dari:

- Audit operasional pada Balai Besar/Balai POM menghasilkan 14 laporan yaitu BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Surabaya, BPOM di Palu, BBPOM di Makassar, BPOM di Kupang, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Mataram, BPOM di Jambi, dan BBPOM di Jakarta.
- Audit operasional pada Unit Pusat menghasilkan 1 laporan meliputi Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Registrasi Obat

Tradisional, Kosmetik dan Suplemen, Kesehatan PPSDM, PPPOMN dan PRKOM

- Audit Tujuan Tertentu (ATT) menghasilkan 1 laporan yang diselenggarakan pada BPOM di Manokwari, BBPOM di Palembang, BBPOM di Makassar (dua kali), Loka POM di Kotawaringin Barat, BBPOM di Bandung, dan BPOM di Palu.

b) Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat I menghasilkan 4 (empat) laporan hasil reviu (LHR) terdiri dari:

- 1) Reviu atas Laporan Keuangan BPOM TA 2018 pada bulan Januari 2019, Reviu Laporan Keuangan BPOM Semester I Tahun 2019, dan Reviu Laporan Keuangan BPOM Triwulan III Tahun 2019.
- 2) Reviu RKA-K/L TA 2019 telah diselenggarakan oleh APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober 2019 serta diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen dan Petugas Perencana dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang bertanggungjawab dalam menyusun RKA-K/L Satker.
- 3) Reviu atas Pelaksanaan Realisasi Anggaran, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) serta Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, APIP sebagai *early warning* dan *quality assurance* diminta untuk melakukan reviu penyerapan

anggaran dan pengadaan barang/jasa secara berkala setiap tiga bulan (triwulan). Tahun Anggaran 2019 dilakukan reviu kualitas belanja untuk mengidentifikasi kualitas belanja dari masing-masing K/L. Reviu kualitas belanja ditujukan untuk menilai kesesuaian alokasi, efisiensi dan efektifitas, ketepatan waktu, transparansi dan akuntabilitas belanja terhadap pelaksanaan realisasi anggaran triwulan IV tahun 2018, triwulan I, II dan III tahun 2019.

4) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)  
Reviu RKBMN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/ PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Tujuan dari dilaksanakannya reviu adalah untuk membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan dan memberi keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RKBMN dengan ketentuan penyusunan RKBMN yang berlaku kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan RKBMN yang berkualitas. Pada tahun 2019 reviu RKBMN dilaksanakan untuk perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Badan POM tahun 2021.

c) Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

SKM merupakan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, Inspektorat I menjadi koordinator dalam pelaksanaan survei yang dimulai dari identifikasi pertanyaan sesuai peraturan, pengumpulan populasi pelanggan dari Unit Pelayanan Publik, pengembangan kuesioner berikut *tools* untuk perhitungannya dalam bentuk *spreadsheet*, hingga koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM dalam pengembangan survei berbasis dalam jaringan (daring) untuk layanan yang sudah dilakukan sepenuhnya secara daring. Pelaksanaan SKM

dimulai pada 8 April 2019 s.d 30 September 2019 dan dilakukan pada 71 jenis layanan pada Unit Pelayanan Pusat dan 3 jenis layanan pada Unit Pelayanan Balai Besar/Balai POM. Hasil SKM dikenal sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menghasilkan 1 (satu) laporan dengan rincian IKM sebagaimana **lampiran 6**.

d) **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.**  
Segala bentuk rekomendasi hasil pengawasan baik dari eksternal (BPK RI ) maupun Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah dalam rangka meningkatkan kinerja BPOM. Oleh karena itu, bagi Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya, melaksanakan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan menghasilkan 1 (satu) laporan yang terdiri dari hasil pengawasan intern yang dilaksanakan setiap triwulan dan hasil pengawasan ekstern setiap semester sebagai bentuk komitmen perbaikan dari unit kerja.

e) **Laporan Hasil Evaluasi SAKIP.**  
Inspektorat Utama diamanatkan untuk menyelenggarakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sedangkan evaluasi pada tingkat instansi ini diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Inspektorat I menyelenggarakan evaluasi SAKIP pada unit kerja yang menjadi wilayah pengawasannya dengan hasil 1 (satu) laporan dan rincian sebagaimana dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**  
Realisasi indikator kinerja ini lebih baik dari capaian tahun 2018 dengan perbandingan sebesar 109,52%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan target dan realisasi dari tahun 2018 yang didukung oleh adanya peningkatan jumlah anggaran yang diberikan. Realisasi ini tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2017 karena perbedaan indikator kinerja dan cara pengukurannya. Indikator kinerja tahun 2017 adalah “Persentase

laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu” dengan realisasi 100%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

**Tabel 21. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 5 dengan Unit sejenis**

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Inspektorat I	23	23	100,00
	Inspektorat II		23	100,00

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor Keberhasilan sasaran ini antara lain:

- Pelaksanaan audit berdasarkan perencanaan yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit.
- Penganggaran yang memadai dan didukung oleh proses reviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada.
- Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

- Perubahan kebijakan secara cepat dan dinamis.
- Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan ekses pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

- Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data revidu, evaluasi SAKIP, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, hingga penyelenggaraan SKM dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **5. Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkup wilayah Inspektorat I**

Badan POM merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam Lampiran I.02, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* mengambil peran dalam terwujudnya laporan keuangan Badan POM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan keuangan Satuan Kerja secara khusus, melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari

kesalahan material yang akan dinilai dari hasil pemeriksaan BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

**Tabel 22. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	82.82%	73.45%	80%	94,24%	117,80%	113,80%	128,30%	80%	117,80%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	73.96%	92.00%	85%	90,33%	106,28%	122,13	98.18%	85%	106.28%

**a. Persentase Laporan Keuangan Satker yang Bebas dari Kesalahan Material**

Parameter yang digunakan adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100%.

**Tabel 23. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-1**

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap realisasi 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(2)	(8) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Capaian indikator kinerja “Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material” tahun 2015 – 2019 sebesar 100%, dengan kategori Baik. Sesuai definisi operasional, capaian 100% berkorelasi dengan opini WTP yang diberikan oleh BPK RI pada Laporan Keuangan Badan POM TA 2018 yang diperiksa pada tahun 2019.

➤ **Perbandingan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2019 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.



**Gambar 19. Ilustrasi Pencapaian Opini WTP dari BPK RI Atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM**

- **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Persentase laporan keuangan Satker yang bebas dari kesalahan material” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

**Tabel 24. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 6 dengan Unit sejenis**

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase laporan keuangan Satker yang bebas dari kesalahan material	Inspektorat I	100%	100%	100%
	Inspektorat II	100%	100%	100%

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan capaian target indikator pada tahun 2019 ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- 1) Reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada umumnya dan Inspektorat I pada khususnya, baik untuk Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini.
- 2) Pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan BPOM berupa pendampingan dan pembinaan kepada BB/BBPOM dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- 3) Penguatan peran *consulting* oleh APIP terutama pada pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Pencapaian indikator kinerja ini perlu terus dipertahankan dengan cara berkoordinasi secara simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reviu sehingga kredibilitas Badan POM dapat dipertahankan.

**b. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti BPOM**

Indikator yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI ini merupakan salah satu indikator yang tidak berubah seiring perubahan struktur organisasi BPOM. Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Persentase ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti sesuai saran oleh BPOM, dan tidak dapat ditindaklanjuti yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Persentase ini berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester yang dibuat oleh BPK RI.

**Tabel 25. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-2**

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7) = (5)/(2)	(8) = (5)/(3)	(8)	(9) = (5)/(8)
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	82,82%	73,45%	80%	94,24%	117,80%	113,80%	128,30%	80%	117,80%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 5 Indikator kinerja “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” memiliki realisasi sebesar 94,24%, berdasarkan Laporan Pemantuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTL-HP) BPK RI periode 30 Juni 2019 yang diterima oleh Badan POM pada Semester II TA 2019 . Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian indikator ini adalah 117,80% (kriteria **Sangat Baik**).

➤ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun sebelumnya**

Realisasi indikator tahun 2019 lebih baik apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 secara persentase mengalami kenaikan mencapai 128.30% dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 113,80%.

➤ **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Pada tahun 2019, Inspektorat I telah melakukan konsolidasi internal sebagai bahan evaluasi. Salah satu poin pentingnya adalah peningkatan persentase pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK melalui beberapa metode sebagai berikut:

- 1) Komitmen pimpinan dengan cara koordinasi dilakukan langsung kepada pimpinan Satker terkait sesuai dengan temuan spesifik pada satuan kerja tersebut.
- 2) Lokakarya Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Pelaku Usaha di Surabaya dan Pertemuan Teknis Peningkatan Kualitas Penindakan dan Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM sebagai bagian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK yang dilaksanakan di Labuan Bajo dan Banyuwangi.

Pasca diselenggarakannya kegiatan-kegiatan tersebut, persentase pemenuhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada BPOM telah meningkat menjadi level Sangat Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Inspektorat I akan melaksanakan upaya-upaya yang telah dilakukan secara konsisten dan mempercepat pelaksanaannya pada tahun 2019.

c. **Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti**

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah, sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional.

Inspektorat I sebagai unit yang mengelola pengawasan intern serta memiliki perangkat personalia auditor menyelenggarakan tugas pengawasan intern baik itu berupa audit, reviu, pemantauan, maupun evaluasi. Utamanya pada audit, *output* dari kegiatan audit adalah rekomendasi kepada unit kerja yang diaudit untuk melaksanakan perbaikan guna tercapainya visi dan misi organisasi. Tindak lanjut maupun pemenuhan terhadap rekomendasi yang diberikan merupakan salah satu parameter yang bisa dikuantifikasikan dalam pekerjaan pengawasan intern pada perwujudan visi dan misi organisasi.

**Tabel 26. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5 Indikator ke-3**

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)=(5)/(2)	(8) = (5)/(3)	(8)	(9)= (5)/(8)
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	73,96%	92,00%	85%	90,33%	106,28%	122,13	98,18%	85%	106,28%

➤ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019**

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 5 Realisasi indikator kinerja “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” adalah sebesar 90,33%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian indikator adalah sebesar 106,28% (kriteria Baik). Rekapitulasi monitoring rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

➤ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator tahun 2019 menurun dari realisasi tahun 2018 dengan perbandingan sebesar 98.18%, dan apabila dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat dengan perbandingan sebesar 122,13%.

- **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

**Tabel 27. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 8 dengan Unit sejenis**

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Inspektorat I	85%	91,08%	107,15
	Inspektorat II	85%	86,00%	101,17

- **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Faktor Keberhasilan capaian yang dikategorikan baik ini karena adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan.
- Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada auditan lebih memperkuat pengendalian atas keberhasilan tujuan organisasi yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multi tafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini menyebabkan unit kerja lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi.
- Penyampaian tindak lanjut dan hasil evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Simolekdesi sehingga mempermudah bagi auditan untuk melakukan tindak lanjut dimanapun dan kapanpun.

Untuk mempertahankan maupun meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat I akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Secara konsisten mengawal rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu.
- 2) Melakukan integrasi data dengan aplikasi *database* data pengawasan yang bernama Simolekdesi Berkinerja. Konten aplikasi ini pada prinsipnya merupakan data-data pengawasan yang dimiliki oleh Badan POM dan khusus untuk audit, proses tindak lanjut dapat dilakukan melalui medium aplikasi tersebut, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan.

#### 6. Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator kinerja yang ditetapkan adalah “Nilai AKIP Inspektorat I” dengan target nilai 81. Nilai AKIP yang dimaksud adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja Inspektorat I. Penilaian terhadap Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dipandang dapat mewakili implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja sebagaimana dituangkan dalam peta jalan RB BPOM 2015-2019.

**Tabel 28. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019			Realisasi 2019 terhadap realisasi 2017 (%)	Realisasi 2019 terhadap 2018 (%)	Target Renstra 2019	Realisasi 2019 terhadap Target Renstra 2019 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8) = (6)/(3)	(9) = (6)/(4)	(10)	(11) = (6)/(10)
Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	74,73	75,31	81	78,14	96,47%	104.56%	103.76%	81	96,47%

#### ➤ Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Dari tabel target dan realisasi kinerja sasaran ke – 6 menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja “Nilai AKIP Inspektorat I” tahun

2019 adalah sebesar 78,14 yang merupakan penilaian terhadap implementasi SAKIP sejak penyusunan laporan, hingga evaluasi atas rencana aksi. Bila dibandingkan dengan target tahun 2019, maka capaian indikator adalah sebesar 96,47% (kriteria Baik).

➤ **Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi indikator tahun 2019 lebih baik dari realisasi tahun 2018 dan 2017 dengan perbandingan masing-masing sebesar 103,76% dan 104,56%.

➤ **Perbandingan realisasi dan capaian indikator “Nilai AKIP” Inspektorat I dengan Unit yang setara/sejenis tahun 2019.**

**Tabel 29. Perbandingan realisasi dan capaian indikator ke 9 dengan Unit sejenis**

Indikator	Unit Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP	Inspektorat I	81	78,14	96,47
	Inspektorat II		78,38	96,76

➤ **Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan**

Nilai AKIP Inspektorat I tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun demikian bila dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi target belum tercapai. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

- a) Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Kurangnya penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.
- c) Lemahnya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan

pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

- d) Belum adanya monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- e) Belum adanya hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk-bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Terhadap hal tersebut, Inspektorat I telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I yang dijabarkan lebih lanjut pada Sub Bab B. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pebaikan Hasil Evaluasi Sakip Periode Tahun 2019.

### **A.3. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat I Periode Renstra 2015 - 2019**

Capaian masing-masing indikator kinerja Inspektorat I Badan POM pada tahun 2015-2019 bila dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada Renstra tahun 2019 dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 30. Perbandingan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 terhadap Target Renstra 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)	(11)	(12) = (11)/(4)	(13)	(14) = (13)/(4)
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100,00	88,89%	111,11
2	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,27	93,01	81,79	99,74
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	97,82	100%	108,69
4	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,5%	102,77	82,36%	91,51
		5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	91,30	23	100,00
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00	100,00%	100,00
		7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80%	81,38%	92,48	72,6%	90,75	82,82%	103,52	73,45%	91,81	94,24%	117,80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)	(11)	(12) = (11)/(4)	(13)	(14) = (13)/(4)
		8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	53,64%	65,41	88,99%	104,69	73,96%	87,01	92%	108,23	90,33%	106,28
6	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Inspektorat I	81	69,67	86,01	72,06	88,96	74,73	92,26	75,31	92,97	78,14	96,47

1. Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui beberapa indikator yang dapat dibandingkan pada periode renstra 2015-2019 sebagai berikut:

- ❖ Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material mempunyai realisasi 100% pada tahun 2015-2019 dan telah sesuai dengan target periode akhir renstra.
- ❖ Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM pada periode 2015-2019 mempunyai realisasi berturut-turut sebesar 81,38%; 72,6%; 82,82%; 73,45%; dan 94,24%, sehingga target periode akhir renstra telah tercapai pada tahun 2019.
- ❖ Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada periode 2015-2019 mempunyai realisasi berturut-turut sebesar 53,64%; 88,99%; 73,96%; 92%; dan 90,33% sehingga target periode akhir renstra telah tercapai pada tahun 2019.
- ❖ Nilai AKIP Inspektorat I pada periode 2015-2019 mempunyai realisasi berturut-turut sebesar 69,67; 72,06; 74,73; 75,31 dan 78,14. Untuk indikator ini tidak mencapai target sampai dengan periode akhir renstra 2019.

Sehingga dapat disimpulkan sasaran strategis tahun 2015-2019 yang berhasil mencapai target adalah sasaran “Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I “ dan yang belum mencapai target adalah sasaran “Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019”.

2. Capaian kinerja pada indikator nomor 1 s.d 5 tidak bisa dibandingkan secara memadai pada periode renstra 2015-2019 yaitu indikator, Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan, Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan, Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja, dan Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja. Indikator kinerja tersebut hanya bisa dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dan 2019. Hal ini disebabkan antara lain:

- ❖ Perubahan organisasi dari Inspektorat menjadi Inspektorat Utama sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

- ❖ Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 menjadi Rencana Strategis Inspektorat I 2018 -2019
  - ❖ Perubahan sasaran strategis, indikator kinerja dan definisi operasional
3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator yang sudah tidak relevan dengan Renstra Inspektorat I sehingga capaian kinerja tidak bisa diperbandingkan sampai dengan periode akhir Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada **tabel 31**.

**Tabel 31. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja yang sudah tidak relevan dengan Renstra Inspektorat I**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	81	N/A	N/A	69,94	86,35	70,78	87,38	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	80%	69,12%	86,40	69,68%	87,10	88,70%	110,88	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	80%	68,36%	85,45	72,04%	90,05	84,31%	105,39	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan	11	10,67	97,00	10,46	95,09	11,05	100,45	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu	90%	85,37%	94,86	106,45%	118,28	100%	111,11	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria "BAIK"	94,50%	90,40%	95,66	100%	105,82	95%	100,53	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Meningkatkan Kapabilitas	Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	100%	2%	2	44,09%	44,09	97,98%	97,98	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	2015		2016		2017		2018		2019	
				Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019	Realisasi	% realisasi thdp Target Renstra 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (7)/(4)	(9)	(10) = (9)/(4)				
	Manajemen Pengawasan Intern												
5	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM)	Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria "BAIK"	100%	100%	100	100%	100	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	29	85,29	34	100	34	100	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Implementasi QMS	Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100	Sertifikasi ISO	100	Sertifikasi ISO	100	N/A	N/A	N/A	N/A

## **B. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PEBAIKAN HASIL EVALUASI SAKIP PERIODE TAHUN 2019**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I Nomor PI.04.7.72.12.19.1288 dari Inspektur Utama, terdapat beberapa rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I. Adapun tindak lanjut rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

1. Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Hal tersebut telah ditindaklanjuti** dengan penyusunan *draft* SOP pengumpulan data kinerja yang up to date, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.

**Hal tersebut telah ditindaklanjuti** dengan terdapat pegawai yang menangani terkait pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Memperkuat komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

**Hal tersebut telah ditindaklanjuti** dengan adanya rapat pembahasan secara berkala oleh pimpinan/kepala sub bagian tata usaha terkait dengan capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.

4. Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

**Hal tersebut telah ditindaklanjuti** dengan adanya rapat pembahasan terkait monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Adapun *reward* yang diberikan berupa usulan pegawai teladan dan berprestasi untuk *punishment* masih dalam proses pembahasan.

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk-bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

**Hal tersebut telah ditindaklanjuti** dengan adanya monitoring capaian sasaran kegiatan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan.

### C. REALISASI ANGGARAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat I Badan POM selama tahun 2019 telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Inspektorat I dilakukan secara lengkap dan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Utama.

Pada tahun 2019 capaian realisasi anggaran Inspektorat I sebesar 97.94% dengan melakukan sebanyak 6 (enam) kali revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Anggaran dan Realisasi Inspektorat I tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel 32. Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat I Tahun 2019**

Kegiatan	Pagu	Realisasi (Bruto)	Pengembalian	Realisasi (Neto)	%
<b>4115.001 - Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I</b>	7.436.030.000	7.386.986.673	103.866.935	7.283.119.738	97.94

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran per sasaran dan indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Kegiatan Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran		
			Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	150.660.000	147.349.617	97.80	150.660.000	147.349.617	97.80
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	458.252.000	419.621.293	91.57	458.252.000	419.621.293	91.57
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	69.173.000	68.431.000	98.93	69.173.000	68.431.000	98.93
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	87.874.000	87.874.000	100.00	1.028.845.000	1.017.606.425	98.91
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	940.971.000	929.732.425	98.81			
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	1.002.544.000	999.507.569	99.70	3.285.358.000	3.253.280.974	99.02
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan	2.196.149.000	2.167.208.437	98.68			

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran		
			Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi
		BPK yang ditindak lanjuti BPOM						
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	86.665.000	86.564.968	99.88			
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	2.443.742.000	2.376.830.429	97.26	2.443.742.000	2.376.830.429	97.26
<b>Jumlah total</b>			<b>7.436.030.000</b>	<b>7.283.119.738</b>	<b>97.94</b>	<b>7.436.030.000</b>	<b>7.283.119.738</b>	<b>97.94</b>

Adapun uraian realisasi anggaran per sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran ke - 1 Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I dengan pagu anggaran sebesar Rp150.660.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp150.660.000,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp3.310.383,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp 147.349.617,00 atau persentase realisasi 97.80%.
2. Sasaran ke - 2 Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor dengan pagu anggaran sebesar Rp458.252.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp435.471.462,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp15.850.169,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp 419.621.293,00 atau persentase realisasi 91.57%.
3. Sasaran ke - 3 Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I dengan pagu anggaran sebesar Rp69.173.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp69.141.000,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp90.000,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp 68.431.000,00 atau persentase realisasi 98.93%.

4. Sasaran ke – 4 Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal dengan pagu anggaran sebesar Rp1.028.845.000, realisasi anggaran sebesar Rp1.028.593.307,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp10.986.883,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp1.017.606.425,00 atau persentase realisasi 98.91%.
5. Sasaran ke – 5 Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP dengan pagu anggaran sebesar Rp3.285.358.000,00, realisasi anggaran sebesar Rp3.280.639.411,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp27.358.437,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp3.253.280.974,00 atau persentase realisasi 99.02%.
6. Sasaran ke – 6 Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp2.443.742.000, realisasi anggaran sebesar Rp2.422.481.492,00 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp45.651.063,00 sehingga realisasi neto sebesar Rp2.376.830.429,00 atau persentase realisasi 97.26%.

#### D. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat I, sebagaimana dapat dilihat pada **lampiran 9** diperoleh informasi sebagai berikut :

**Tabel 34. Efisiensi Per Sasaran terhadap Anggaran**

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	97.80%	88,89%	0.91	1.00	(0.09)	Tidak Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	91.57%	100%	1.09	1.00	0.09	Efisien
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	98.93%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien

No.	Sasaran	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal	98.91%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP	99.02%	100%	1.01	1.00	0.01	Efisien
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	97.26%	100%	1.03	1.00	0.03	Efisien

Dari Tabel efisiensi per sasaran terhadap anggaran, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 6 (enam) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang kurang dari 1 yakni Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I dengan indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang disebabkan oleh tidak tercapainya 1 (satu) target audit tujuan tertentu pada Balai Besar POM di Jakarta. Adapun realisasi kegiatan untuk sasaran ini yaitu BPOM di Manokwari, BBPOM di Palembang, BBPOM di Makassar (2 kali), Loka Kotawaringin Barat, BBPOM di Bandung, Balai Besar di POM Jakarta dan BPOM Palu.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Inspektorat I Tahun 2019 mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Pada tahun 2019 yang merupakan tahun kelima dari RPJMN (2015-2019) dan Renstra Badan POM 2015-2019, terdapat beberapa keberhasilan antara lain mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2018 dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti Badan POM sebesar 94,24% yang merupakan persentase tertinggi di wilayah AKN VI BPK RI.

Secara garis besar, sasaran strategis Inspektorat I yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja 2019 dapat dicapai. Namun demikian, masih terdapat pencapaian 3 (tiga) sasaran yang belum optimal yaitu:

#### 1) **Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor, dengan indikator “Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern”**

Pencapaian kurang optimal dalam sasaran ini dikarenakan kurangnya Sarana dan prasarana (ruangan fasilitas) dalam pemberian layanan di Inspektorat Utama, Aplikasi Simolekdesi belum optimal dalam monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan hasil audit Inspektorat Utama, dan Solusi belum optimal dalam pemberian layanan konsultasi oleh Inspektorat Utama. Agar peningkatan kinerja Inspektorat I terhadap sasaran tersebut dapat tercapai, Inspektorat I menyusun rencana aksi sebagai berikut :

- Adanya (ruangan fasilitas) dalam pemberian layanan di Inspektorat Utama, peningkatan layanan konsultasi/*helpdesk* yang akan difasilitasi dengan forum konsultasi, dan pengoptimalisasian aplikasi untuk konsultasi.
- Sosialisasi aplikasi simolekdesi sebagai kemudahan tindak lanjut hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja.
- Peningkatan layanan konsultasi melalui Aplikasi Solusi dengan memberikan layanan konsultasi tidak melebihi *timeline*.

- Pembahasana hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM.

**2) Tata Kelola, Manajemen Resiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal, dengan indikator “Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja”.**

Capaian untuk sasaran ini tidak mencapai target disebabkan oleh :

- a) Satuan tugas SPIP selaku personil melaksanakan *self assessment* belum dapat melaksanakan penilaian dengan independen dan objektif, sehingga hasil yang diperoleh hampir seluruhnya dalam kategori tinggi namun pada saat dilakukan verifikasi oleh Tim dari Inspektorat I terjadi penurunan karena terdapat unit kerja yang tidak melampirkan data dukung.
- b) Tahun 2018 Verifikasi PM-EPITE dilaksanakan oleh auditor internal QMS yang juga merupakan bagian dari suatu unit kerja yang dapat peran regulernya juga merupakan pelaksana kegiatan sehari-hari pada unit tersebut sehingga belum cukup objektif dalam melaksanakan verifikasi namun pada tahun 2019 verifikasi dilakukan oleh tim dari Inspektorat I.

Mengingat pentingnya implementasi SPIP pada penyelenggaraan kegiatan, maka Inspektorat I melakukan beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan Inspektorat II dalam hal pengumpulan hasil PM-EPITE, sehingga seluruh unit kerja mengirimkan hasil yang dimaksud.
- Melakukan verifikasi bersamaan dengan proses audit yang diselenggarakan pada unit kerja yang berada di lingkup wilayah Inspektorat I sehingga bisa mendapatkan data dukung untuk verifikasi yang lebih lengkap.

**3) Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019, dengan indikator “Nilai AKIP Inspektorat I”**

Nilai AKIP Inspektorat I tahun 2019 tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun demikian bila dibandingkan dengan target tahun 2019, realisasi target belum tercapai. Beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian tersebut adalah:

- a) Belum adanya pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Kurangnya penyajian informasi perihal pengukuran kinerja, utamanya dengan memberi penekanan pada mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang sistematis dan mampu telusur.
- c) Lemahnya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- d) Belum adanya monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- e) Belum adanya hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk-bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Terhadap hal tersebut, Inspektorat I telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja 2019, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi dalam rangka peningkatan indeks Kepuasan mitra pengawasan intern dan melaksanakannya secara optimal serta melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap kemajuan pelaksanaannya.
- b. Menyusun mekanisme tentang pengumpulan data kinerja, melakukan reviu internal terkait analisis capaian kinerja secara memadai dan berkala, serta mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi internal untuk peningkatan kinerja.

## Lampiran 1

### REVISI RENSTRA INSPEKTORAT I BADAN POM

Perspektif	Sasaran	Indikator	Target Kinerja dan Sasaran (Renstra Lama)					Indikator	Target Kinerja dan Sasaran (Reviu Renstra)				
			2015	2016	2017	2018	2019		2015	2016	2017	2018	2019
<i>Customer Perspective</i>	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I.	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	-	-	-	70%	80%
	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	84	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	82	82
<i>Internal Process Perspective</i>	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	-	-	-	90%	92%	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	-	-	-	90%	92%
	Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Level Maturitas SPIP	-	-	-	Level 3	Level 3	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	-	-	-	84%	90%
		Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	-	-	21	23
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	-	-	-	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	78%	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	-	-	75%	80%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	87%	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	-	-	-	85%	85%
<i>Learning and Growth Perspective</i>	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	-	-	-	75	75.26	Nilai AKIP Inspektorat I	-	-	-	78	81

## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2019



### **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mustofa, Apt, M.Kes  
Jabatan : Inspektur I  
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.  
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si



Drs. Mustofa, Apt, M.Kes

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT I BADAN POM Periode : Januari - Desember 2019

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Customer Perspektive	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80 %
		Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82
2	Internal Perspective Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92 %
		Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90
			Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23
		Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material	100%
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80 %
			Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85 %
3	Learn & Growth Perspektive	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP	81

**Program**  
 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

**Anggaran**  
 Rp. 7.436.030.000

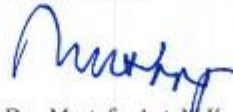
Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,




Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si

Pihak Pertama,



Drs. Mustofa, Apt, M.Kes



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
Email : infopom@inda.net.id, inspektorat1@pom.go.id, tuinspektorat1bpom@gmail.com ; Website : www.pom.go.id

---

**KEPUTUSAN**  
**INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR B-HK.04.03.71.09.18.1765**  
**TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**TAHUN 2019**

**INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik; dan  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur I tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat I Badan pengawas Obat dan Makanan

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);  
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015;  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;  
5. Peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasa Obat dan Makanan;  
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax: 4245139  
Email : infopom@indo.net.id, inspektorat1@pom.go.id, tuinspektorat1bpom@gmail.com ; Website : www.pom.go.id

10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-HK.04.03.7.03.18.0149 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018-2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
- Pertama : Indikator Kinerja Utama menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2018-2019
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk periode Renstra Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018-2019

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 September 2018  
Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Inspektur I,



Drs. Mustofa, Apt, M. Kes



**LAMPIRAN**

Keputusan Inspektur I BPOM  
 Nomor : B-HK.04.03.71.09.18.1765  
 Tanggal : 28 September 2018

- 1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 2. Tugas : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Sekretariat Utama, Pusat, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
- 3 Fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - b. Penyusunan rencana program pengawasan intern pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - c. Pengawasan intern terhadap keuangan dan kinerja melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada lingkup mitra pengawasan Inspektorat I;
  - d. Pelaporan hasil pengawasan; dan
  - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, 4246726; fax : 4245139  
 Email : infopom@indo.net.id, inspektorat1@pom.go.id, tuinspektorat1bpom@gmail.com ; Website : www.pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
2	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan
	Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja
	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase laporan keuangan satker yang bebas dari kesalahan material Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
3	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 28 September 2018  
 Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Inspektur I,



Drs. Mustofa, Apt, M. Kes

## Lampiran 4

### REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN MITRA INSPEKTORAT I 2019

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator		Skor	Indeks
Wujud Fisik (Tangible)	1	Layanan yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Utama sesuai prosedur	82%	80,65%
	2	Prosedur pelayanan konsultasi, reviu, dan bimbingan teknis mudah	81%	
	3	Jenis layanan yang unit kerja butuhkan dengan hasil yang diharapkan telah sesuai	80%	
	4	Informasi yang disajikan dalam laporan hasil penugasan Inspektorat Utama informatif	81%	
	5	Sikap dan perilaku Tim Inspektorat Utama dalam pelayanan baik	84%	
	6	Kemampuan komunikasi Tim Inspektorat Utama baik dan mudah dipahami	81%	
	7	Sarana dan prasarana (ruangan, fasilitas) dalam pemberian layanan di Inspektorat Utama baik	79%	
	8	Aplikasi Si Molek Desi efektif dan membantu dalam penyampaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan hasil audit Inspektorat Utama	79%	
	9	Aplikasi SOLUSI efektif dan membantu dalam pemberian layanan konsultasi oleh Inspektorat Utama	79%	
Keandalan (Reliability)	1	Tim Inspektorat Utama memahami Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan intern	83%	81,91%
	2	Tim Inspektorat Utama memahami Proses Bisnis Utama Unit Kerja Saudara	81%	
	3	Tim Inspektorat Utama memberikan nilai tambah untuk Unit Kerja Saudara	81%	
	4	Tim Inspektorat Utama melakukan kegiatan yang relevan dengan penugasannya	83%	
	5	Tim Inspektorat Utama memberikan respon/umpan balik (feedback) atas tindak lanjut yang dilakukan Unit Kerja Saudara	82%	
Kesigapan (Responsiveness)	1	Tim Inspektorat Utama dalam melaksanakan layanan (penugasan atau konsultasi) tepat waktu	82%	81,63%
	2	Penyampaian laporan hasil penugasan Inspektorat Utama sesuai standar layanan	83%	
	3	Tim Inspektorat Utama mampu memberikan solusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul pada Unit Kerja Saudara	83%	
	4	Tim Inspektorat Utama responsif dalam pelaksanaan tugas/tindak lanjut	80%	

Dimensi Quality Service	Variabel Indikator		Skor	Indeks
Jaminan (Assurance)	1	Hasil pengawasan intern (temuan/hasil evaluasi/hasil revidi) Inspektorat Utama telah didukung dengan bukti-bukti yang obyektif dan relevan	82%	82,01%
	2	Rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama dapat ditindaklanjuti	82%	
	3	Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama dapat menghilangkan penyebab dan meminimalkan dampak akibat ketidaksesuaian yang terjadi pada Unit Kerja Saudara	82%	
	4	Tim Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan unit kerja melalui audit, revidi, evaluasi, analisis, pendampingan, dll (Fungsi Penjaminan/ Assurance)	82%	
	5	Tim Inspektorat Utama menjalankan fungsinya dalam mendorong efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Unit Kerja Saudara (Fungsi Risk Management)	82%	
	6	Tim Inspektorat Utama menjalankan fungsinya untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di Unit Kerja Saudara (Fungsi Accountability)	82%	
	7	Pengawasan intern Inspektorat Utama membantu peningkatan kinerja Satuan Kerja/Unit Organisasi	82%	
Empati (Empathy)	1	Inspektorat Utama memberikan layanan konsultasi dengan baik	84%	82,73%
	2	Penanganan pengaduan di Inspektorat Utama baik	82%	
	3	Pelayanan Inspektorat Utama mudah diakses (aplikasi SOLUSI, kunjungan, surat)	81%	
	4	Tim Inspektorat Utama dapat menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama penugasan pengawasan intern pada Unit Kerja Saudara	84%	

## Lampiran 5

### Rekapitulasi Hasil PM-EPITE Tahun 2018 dan 2019

#### Unit Kerja di Lingkup Wilayah Inspektorat I

NO	Unit	Nilai 2018	Unit	Nilai 2019
1	Direktorat Registrasi Obat	94,00	Direktorat Registrasi Obat	83,00
2	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	97,00	Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,00
3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	89,00	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	85,00
4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	97,00	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	87,00
5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	96,00	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,00
6	Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,00
7	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik		Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83,00
8	Direktorat Pengawasan Kosmetik		Direktorat Pengawasan Kosmetik	83,00
9	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,00
10	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	95,00	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	81,00
11	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	85,50
12	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	89,00	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	80,00
13	BBPOM di Banda Aceh	98,00	BBPOM di Banda Aceh	80,00
14	BBPOM di Pekanbaru	90,00	BBPOM di Pekanbaru	81,00
15	BPOM di Jambi	88,00	BPOM di Jambi	77,00
16	BBPOM di Palembang	93,00	BBPOM di Palembang	84,00
17	BBPOM di Bandar Lampung	88,00	BBPOM di Bandar Lampung	76,00
18	BBPOM di Jakarta	96,00	BBPOM di Jakarta	83,00

NO	Unit	Nilai 2018	Unit	Nilai 2019
19	BBPOM di Bandung	90.00	BBPOM di Bandung	84,00
20	BBPOM di Surabaya	100.00	BBPOM di Surabaya	88,00
21	BBPOM di Mataram	93.00	BBPOM di Mataram	85,00
22	BPOM di Kupang	86.00	BPOM di Kupang	81,00
23	BBPOM di Palangka Raya	94.00	BBPOM di Palangka Raya	80,00
24	BBPOM di Samarinda	100.00	BBPOM di Samarinda	82,00
25	BBPOM di Banjarmasin		BBPOM di Banjarmasin	78,00
26	BPOM di Palu	94.00	BPOM di Palu	81,00
27	BBPOM di Makassar		BBPOM di Makassar	86,00
28	BPOM di Manokwari	82.00	BPOM di Manokwari	79,00
29	Inspetorat 2	87.00	Inspetorat 2	86,00
	<b>Rata-Rata</b>	<b>91,30</b>	<b>Rata-Rata</b>	<b>82,36</b>

## Lampiran 6

### Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik di BPOM Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Unit Pelayanan Pusat	Nilai SKM Tahun 2018	Nilai SKM Tahun 2019
1.	Dit. Registrasi Obat	77,66	79,93
2.	Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	81,23	83,27
3.	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	85,11	86,36
4.	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	81,43	83,72
5.	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80,30	76,70
6.	Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	86,13	84,25
7.	Dit. Pengawasan Kosmetik	87,85	81,29
8.	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	80,53	83,27
9.	Dit. Registrasi Pangan Olahan	83,08	83,96
10.	Dit. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	79,45	86,99
11.	Dit. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	79,17	84,03
12.	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha		81,48
13.	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	78,21	82,20
14.	Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	77,05	77,08
	<b>Total nilai</b>	<b>75,35</b>	<b>80,68</b>

No	Unit Pelayanan BB/BPOM	Nilai SKM Tahun 2018	Nilai SKM Tahun 2019
1.	Balai Besar POM Di Banda Aceh	76,98	84,41
2.	Balai Besar POM Di Medan	82,50	89,12
3.	Balai Besar POM Di Padang	76,74	87,77
4.	Balai Besar POM Di Pekanbaru	89,10	90,24
5.	Balai Besar POM Di Palembang	76,91	94,39
6.	Balai Besar POM Di Bandar Lampung	84,64	85,16
7.	Balai Besar POM Di Jakarta	79,63	86,17
8.	Balai Besar POM Di Bandung	78,84	87,28
9.	Balai Besar POM Di Semarang	80,78	86,51
10.	Balai Besar POM Di Yogyakarta	81,48	87,91
11.	Balai Besar POM Di Surabaya	87,04	94,20
12.	Balai Besar POM Di Serang	85,71	85,82
13.	Balai Besar POM Di Denpasar	86,39	91,32
14.	Balai Besar POM Di Mataram	82,18	86,90
15.	Balai Besar POM Di Pontianak	79,17	89,40

No	Unit Pelayanan BB/BPOM	Nilai SKM Tahun 2018	Nilai SKM Tahun 2019
16.	Balai Besar POM Di Palangka Raya	83,63	86,96
17.	Balai Besar POM Di Banjarmasin	82,47	87,90
18.	Balai Besar POM Di Samarinda	84,95	86,03
19.	Balai Besar POM Di Manado	80,69	81,15
20.	Balai Besar POM Di Makassar	79,11	88,77
21.	Balai Besar POM Di Jayapura	79,72	86,52
22.	Balai POM Di Jambi	86,51	79,42
23.	Balai POM Di Bengkulu	86,18	90,32
24.	Balai POM Di Batam	81,72	87,44
25.	Balai POM Di Kupang	82,87	83,21
26.	Balai POM Di Palu	84,47	86,02
27.	Balai POM Di Kendari	80,17	87,58
28.	Balai POM Di Ambon	82,64	84,76
29.	Balai POM Di Pangkalpinang	83,70	80,28
30.	Balai POM Di Gorontalo	88,74	88,06
31.	Balai POM Di Manokwari	78,06	94,44
32.	Balai POM Di Mamuju	-	82,64
33.	Balai POM Di Sofifi	-	79,56
	<b>Total nilai</b>	<b>82,67</b>	<b>87,37</b>

## Lampiran 7

### Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 di lingkup wilayah Inspektorat I

No	Nama Unit	Rincian Nilai					Total Nilai
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	
1	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Prekursor, Psikotropika, dan Zat Adiktif	25,1	18,75	10,12	6,1	16,36	76,42
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	26,22	19,69	10,76	7,35	12,83	76,85
3	Direktorat Pengawasan Distribusi & Pelayanan ONPP	25,64	18,44	12,04	5,5	15,92	77,54
4	Direktorat Registrasi Obat	24,62	17,5	10,88	6,85	14,73	74,58
5	Direktorat Standardisasi ONPPZA	25,39	16,88	12,76	6,77	13,43	75,22
6	Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	24,79	15,94	11,68	6,73	15,63	74,75
7	Direktorat KMEI ONPPZA	23,51	17,50	11,82	8,42	13,31	74,56
8	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	24,72	16,25	11,05	7,16	15,88	75,05
9	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	26,06	19,69	10,88	7,15	13,1	76,87
10	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	26,22	18,13	11,24	6,94	13,99	76,51
11	Direktorat Pengawasan Kosmetik	24,69	17,50	12,31	6,77	14,74	76,01
12	Inspektorat II	25,82	18,13	13,11	6,85	14,48	78,39
13	PRKOM	24,97	16,88	13,25	6,12	13,75	74,96
14	PPPOMN	25,69	18,13	11,32	6,64	13,27	75,05
15	PPSDM	26,01	19,06	11,46	7,06	13,06	76,65
16	Balai Besar POM di Banda Aceh	23,59	19,69	11,69	7,37	13,05	75,39
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	25,03	19,06	12,35	7,06	13,46	76,96
18	Balai Besar POM di Palembang	26,83	15,94	13,03	6,20	15,76	77,76
19	Balai POM di Jambi	23,55	18,13	12,39	8,19	14,61	76,86
20	Balai Besar POM di Bandar Lampung	23,76	18,13	12,40	6,85	12,80	73,93

No	Nama Unit	Rincian Nilai					Total Nilai
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	
21	Balai Besar POM di Jakarta	24,56	17,50	12,76	8,02	14,28	77,11
22	Balai Besar POM di Bandung	27,03	19,06	10,87	6,48	14,53	77,97
23	Balai Besar POM di Surabaya	25,86	19,06	13,03	7,79	12,33	78,07
24	Balai Besar POM di Mataram	26,93	19,06	10,87	6,27	14,53	77,66
25	Balai Besar POM di Banjarmasin	25,37	17,19	12,8	6,41	12,37	74,14
26	Balai Besar POM di Makassar	25,53	16,56	13,03	6,37	15,13	76,61
27	Balai POM di Palu	24,9	16,56	13,34	7,08	13,9	75,77
28	Balai Besar POM di Samarinda	25,45	17,50	12,49	7,85	13,86	77,15
29	Balai Besar POM di Palangkaraya	26,59	16,88	11,2	6,99	13,59	75,25
30	Balai Besar POM di Kupang	24,22	18,13	12,54	8,06	12,77	75,70
31	Balai POM di Manokwari	24,97	15,31	12,35	6,58	14,02	73,23

## Lampiran 8

### Monitoring Status Temuan Audit Inspektorat Badan POM Tahun Audit 2013 s.d. Tahun 2017 Per 31 Des 2019

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang Setor (Rp)
1	BPOM di Aceh	2013	8	20	20	0	0	4.905.133,00	4.905.133,00	-
		2014	6	17	17	0	0	6.605.000,00	6.605.000,00	-
		2016	5	18	18	0	0	24.372.121,35	24.372.121,35	-
		2017	4	9	9	0	0	-	-	-
		2017	2	5	5	0	0	-	-	-
		2018	6	16	16	0	0	-	-	-
2	BPOM di Pekanbaru	2013	6	15	15	0	0	22.593.463,00	22.593.463,00	-
		2015	4	11	11	0	0	42.248.600,00	42.248.600,00	-
		2016	5	14	13	1	0	44.600.000,00	20.100.000,00	24.500.000,00
		2017	3	11	11	0	0	2.568.095,00	2.568.095,00	-
		2018	3	8	8	0	0	-	-	-
		2019	7	18	7	11	0	41.510.235,47	22.510.319,00	18.999.916,47
3	BPOM di Palembang	2013	8	17	17	0	0	19.600.000,00	19.600.000,00	-
		2014	8	24	24	0	0	99.024.825,00	99.024.825,00	-
		2016	5	16	16	0	0	12.949.200,00	12.949.200,00	-
		2018	4	15	15	0	0	5.002.425,00	5.002.425,00	-
		2019	8	19	16	3	0	18.233.750,00	18.233.750,00	-
4	BPOM di Jambi	2013	8	19	19	0	0	17.269.710,00	17.269.710,00	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang Setor (Rp)
		2014	8	17	17	0	0	9.636.200,00	9.636.200,00	-
		2015	5	13	13	0	0	24.687.000,00	24.687.000,00	-
		2016	6	15	15	0	0	52.853.400,00	52.853.400,00	-
		2017	3	7	7	0	0	4.390.000,00	4.390.000,00	-
		2018	9	14	14	0	0	285.000,00	285.000,00	-
		2019	8	29	0	1	28	6.135.022,00	-	6.135.022,00
5	BBPOM Bandar Lampung	2013	7	21	21	0	0	17.222.280,00	17.222.280,00	-
		2015	7	17	17	0	0	10.366.000,00	10.366.000,00	-
		2016	9	20	20	0	0	10.098.356,67	10.098.357,00	(0,33)
		2017	4	15	15	0	0	2.577.044,00	2.577.044,00	-
		2018	6	17	17	0	0	900.000,00	900.000,00	-
		2019	7	25	11	9	5	3.350.000,00	3.350.000,00	-
6	BBPOM di Jakarta	2014	9	24	24	0	0	24.973.850,00	24.973.850,00	-
		2016	7	7	7	0	0	-	-	-
		2018	6	11	9	2	0	-	-	-
		2019	8	23	13	10	0	-	-	-
7	BBPOM di Bandung	2014	6	15	15	0	0	110.339.378,00	110.339.378,00	-
		2016	7	18	18	0	0	1.367.294,00	1.367.294,00	-
		2019	11	33	23	10	0	17.887.464,00	17.887.464,00	-
8	BBPOM di Surabaya	2014	8	23	23	0	0	34.826.850,00	34.826.850,00	-
		2015	4	9	9	0	0	37.982.256,00	37.982.256,00	-
		2016	3	8	8	0	0	-	-	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang Setor (Rp)
		2018	7	17	17	0	0	209.700,00	209.700,00	-
		2019	8	23	23	0	0	-	-	-
9	BBPOM di Mataram	2014	6	14	14	0	0	75.879.500,00	75.879.500,00	-
		2016	6	14	14	0	0	4.692.400,00	4.692.400,00	-
		2018	8	14	14	0	0	13.305.989,00	13.306.889,00	(900,00)
		2018 (2)	2	2	2	0	0	-	-	-
		2019	7	17	0	0	17	-	-	-
		2013	7	13	13	0	0	79.627.753,00	79.627.753,00	-
10	BPOM di Kupang	2014	7	16	16	0	0	181.605.000,00	181.605.000,00	-
		2015	4	8	8	0	0	15.499.840,00	15.499.840,00	-
		2016	5	12	12	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00	-
		2017	4	9	9	0	0	12.619.946,00	12.619.946,00	-
		2018	6	11	11	0	0	-	-	-
		2013	6	17	17	0	0	7.440.538,00	7.440.538,00	-
11	BPOM di Palangkaraya	2015	4	14	14	0	0	182.401.096,00	182.401.096,00	-
		2016	7	11	11	0	0	6.870.400,00	6.870.400,00	-
		2018	9	20	20	0	0	-	-	-
		2013	7	14	14	0	0	3.846.400,00	4.063.400,00	(217.000,00)
12	BBPOM di Samarinda	2014	8	18	18	0	0	16.579.548,00	16.579.548,00	-
		2015	5	9	9	0	0	10.292.450,00	10.350.640,00	(58.190,00)
		2017	2	6	6	0	0	-	-	-
		2018	5	9	9	0	0	-	-	-
		2013	7	14	14	0	0	-	-	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang Setor (Rp)
		2019	7	16	15	1	0	161.255,00	161.255,00	-
13	BPOM di Banjarmasin	2014	9	25	25	0	0	43.122.693,00	43.122.693,00	-
		2015	6	11	11	0	0	8.162.782,00	8.175.468,00	-
		2016	5	19	19	0	0	-	-	-
		2017	3	7	7	0	0	974.489,00	974.489,00	-
		2018	3	10	8	2	0	-	-	-
		2019	7	28	18	10	0	11.174.000,00	11.174.000,00	-
		14	BPOM di Palu	2013	7	18	18	0	0	13.803.050,00
2014	9			23	23	0	0	34.749.000,00	34.749.000,00	-
2015	5			11	11	0	0	3.320.800,00	3.320.800,00	-
2016	7			14	14	0	0	-	-	-
2017	5			13	13	0	0	-	-	-
2018	6			10	10	0	0	560.000,00	560.000,00	-
2019	6			18	18	0	0	-	-	-
15	BPOM di Makassar	2015	3	6	6	0	0	7.371.160,00	7.371.160,00	-
		2016	6	9	9	0	0	21.913.512,00	21.913.512,00	-
		2017	3	9	9	0	0	43.154.208,00	43.154.208,00	-
		2018	7	15	15	0	0	3.965.869,00	3.965.869,00	-
		2019	6	22	19	3	0	11.215.512,00	11.215.512,00	-
16	BPOM di Manokwari	2013	9	17	17	0	0	29.512.627,00	29.512.627,00	-
		2015	4	18	18	0	0	25.035.170,00	25.035.170,00	-
		2017	5	16	16	0	0	7.805.600,00	7.805.600,00	-

No.	Nama Unit Kerja	Tahun Audit	Σ Temuan	Σ Rekomendasi	SS	BSS	BTL	Nilai Setor (Rp)	Telah Setor (Rp)	Kurang Setor (Rp)
		2018	6	16	16	0	0	8.603.490,00	8.603.490,00	-
17	Dit. Was Distribusi Obat dan Nappza	2015	4	4	4	0	0	-	-	-
18	Dit. Registrasi Obat	2016	2	5	2	3	0	-	-	-
		2019	6	13	0	7	6	-	-	-
19	Dit. Reg OT, Kos, SM	2019	6	12	11	1	0	-	-	-
20	Dit. Was Napza	2016	5	9	9	0	0	-	-	-
21	Dit. Insert OT, Kos, SM	2015	3	2	2	0	0	-	-	-
23	PPPOMN	2018	2	8	8	0	0	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>540</b>	<b>1.345</b>	<b>1.215</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>1.618.585.729,49</b>	<b>1.569.239.567,35</b>	<b>49.346.162,14</b>
	<b>Persentase</b>				<b>90,33%</b>	<b>5,50%</b>	<b>4,16%</b>		<b>96,95%</b>	<b>3,14%</b>

## Lampiran 9

### PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)		
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I.	1	<b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penelusuran Pengaduan</b>					
			1	Audit Tujuan Tertentu/Investigasi/Penelusuran Kasus/TL Pengaduan Inspektorat I	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	150.660.000	147.349.617	97,80
					<u>Output:</u>			
Laporan hasil klarifikasi/audit tujuan tertentu/audit investigasi yang disusun (lap)	9	8	88,89					
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	1	<b>Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern</b>					
			1	Perjalanan Pimpinan (Sosialisasi/Bimtek) Inspektur Utama	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	318.760.000	281.046.382	88,17
					<u>Output:</u>			
			Laporan hasil Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)	1	1	100		
			2	Bimbingan Teknis Perjalanan Pimpinan Inspektorat 1	<u>Input:</u>			
					Dana (Rp)	128.052.000	127.514.911	99,58
					<u>Output:</u>			
Laporan hasil Supervisi, Bimbingan Teknis, dan Perjalanan Pimpinan (lap)	1	1	100					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
		3	Peningkatan Kompetensi Pegawai Inspektorat I	<u>Input:</u> Dana (Rp)	11.440.000	11.060.000 96,68
				<u>Output:</u> Laporan Peningkatan Kompetensi Pegawai Inspektorat I	1	1 100
3	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	1	<b>Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Program Penguatan Pengawasan</b>			
		1	Sosialisasi Saber Pungli	<u>Input:</u> Dana (Rp)	32.558.000	31.938.000 98,10
				<u>Output:</u> Laporan Sosialisasi Saber Pungli (Lap)	1	1 100
		2	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	<u>Input:</u> Dana (Rp)	36.615.000	36.493.000 99,67
				<u>Output:</u> Laporan hasil kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L terkait (lap)	1	1 100
4	Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di lingkup wilayah Inspektorat I	1	<b>Tingkat Keandalan SPIP pada Mitra Kerja</b>			
		1	Lokakarya SPIP Manajemen Resiko	<u>Input:</u> Dana (Rp)	87.874.000	87.874.000 100
				<u>Output:</u>		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
			Laporan Lokakarya Manajemen Resiko (Lap)	1	1	100	
		<b>2</b>	<b>Jumlah Laporan Pengawasan Intern Pada Mitra Kerja</b>				
		1	Audit Operasional/Tematik/Kinerja Inspektorat I	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	827.505.000	816.853.361	98,71
				<u>Output:</u>			
			Laporan audit operasional yang disusun (lap)	17	17	100	
		2	Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	71.331.000	70.780.579	99,23
				<u>Output:</u>			
			Laporan hasil survei kepuasan masyarakat (lap)	1	1	100	
		3	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	42.135.000	42.098.485	99,91
				<u>Output:</u>			
			Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang disusun (lap)	1	1	100	
5	Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	<b>1</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Satker Yang Bebas dari Kesalahan Material</b>				
		1	Reviu LK/RKA-KL/BMN	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	510.829.000	509.713.701	99,78
				<u>Output:</u>			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
			Laporan Hasil Reviu yang disusun (lap)	1	1	100	
		2	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	440.700.000	440.345.000	99,92	
			<u>Output:</u>				
			Laporan workshop pengendalian intern atas pelaporan keuangan dengan satker pusat (lap)	1	1	100	
		3.	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	51.015.000	49.448.868	96,93	
			<u>Output:</u>				
			Laporan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1	1	100	
		2	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM</b>				
		1	Pertemuan pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	31.552.000	31.457.490	99,70	
			<u>Output:</u>				
			Laporan pertemuan pemantauan progress penyelesaian TL Temuan BPK (lap)	1	1	100	
		2	Lokakarya Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	881.448.000	867.622.765	98,43	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
			<u>Output:</u>			
		Sinergitas dengan Mitra Kerja BPOM di Jawa Timur	Laporan Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergitas dengan Mitra Kerja BPOM di Jawa Timur (lap)	1	1	100
		3	<u>Input:</u>			
		Pertemuan Teknis Peningkatan Efektivitas Fungsi Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Kinerja BPK RI	Dana (Rp)	943.699.000	928.974.439	98,44
			<u>Output:</u>			
			Laporan Teknis Peningkatan Efektivitas Fungsi Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Kinerja BPK RI (lap)	1	1	100
		4	<u>Input:</u>			
		Pendampingan BPK RI	Dana (Rp)	211.860.000	211.571.226	99,86
			<u>Output:</u>			
			Laporan hasil pendampingan BPK RI (lap)	1	1	100
		5.	<u>Input:</u>			
		Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	Dana (Rp)	127.590.000	127.582.517	99,99
			<u>Output:</u>			
			Laporan Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK (lap)	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
		<b>3</b>	<b>Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti</b>				
		1	Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	86.665.000	86.564.969	99,88
				<u>Output:</u>			
				Laporan pemantauan monitoring dan evaluasi (lap)	4	4	100
<b>6</b>	Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	<b>1</b>	<b>Nilai AKIP Inspektorat I</b>				
		1	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	17.465.000	17.443.200	99,88
				<u>Output:</u>			
				Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	4	4	100
		2	Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	42.422.000	42.364.000	99,86
				<u>Output:</u>			
				Kajian/pedoman/peraturan (lap)	1	1	
		3	Evaluasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan	<u>Input:</u>			
				Dana (Rp)	633.735.000	613.666.480	96,83
				<u>Output:</u>			
				Laporan Evaluasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TOTAL (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)	
		4	Audit Internal QMS ISO Inspektorat I	<u>Input:</u>			
			Dana (Rp)	3.450.000	3.087.995	89,50	
			<u>Output:</u>				
		5	Audit Surveillance QMS ISO Inspektorat I	Laporan hasil audit internal QMS ISO Inspektorat I (lap)	1	1	100
			5	Audit Surveillance QMS ISO Inspektorat I	<u>Input:</u>		
				Dana (Rp)	4.140.000	4.138.500	99,96
		<u>Output:</u>					
		6.	Tinjauan Manajemen Unit Inspektorat I	Laporan hasil audit surveilan QMS Inspektorat I (lap)	1	1	100
			6.	Tinjauan Manajemen Unit Inspektorat I	<u>Input:</u>		
				Dana (Rp)	4.845.000	4.841.000	99,92
		<u>Output:</u>					
		7	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program	Laporan Tinjauan Manajemen Inspektorat I (Lap)	1	1	100
7	Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - Program		<u>Input:</u>				
	Dana (Rp)		1.737.685.000	1.691.289.253	97,33		
	<u>Output:</u>						
			Laporan Dukungan Manajemen Pengawasan Intern Keuangan dan Umum - program	1	1	100	

## Lampiran 10

### PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019

No.	Sasaran/ Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Audit Tujuan Tertentu/ investigasi/ penelusuran kasus/ pengaduan TL	97,80	88,89%	0,91	1,00	(0,09)	Tidak Efisien
2	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor						
	Perjalanan Pimpinan (Sosialisasi/Bimtek) Inspektur Utama	88,17	100	1,13	1,00	0,13	Efisien
	Bimbingan Teknis Perjalanan Pimpinan Inspektorat 1	99,58	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Peningkatan Kompetensi Pegawai Inspektorat I	96,68	100	1,03	1,00	0,03	Efisien
3	Terlaksananya Rencana Aksi RB BPOM program penguatan pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I						
	Sosialisasi Saber Pungli	98,10	100	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dan antar K/L	99,67	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
4	Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang andal						
	Lokakarya SPIP Manajemen Resiko	100	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Audit Operasional/Tematik/Kinerja Inspektorat I	98,71	100	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik	99,23	100	1,01	1,00	0,01	Efisien
	Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	99,91	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
5	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM yang sesuai SAP						
	Reviu LK/ RKA-K/L/BMN	99,78	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	99,92	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	96,93	100	1,03	1,00	0,03	Efisien
	Pertemuan pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	99,70	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Lokakarya Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergitas dengan Mitra Kerja BPOM di Jawa Timur	98,43	100	1,02	1,00	0,02	Efisien
	Pertemuan Teknis Peningkatan Efektivitas Fungsi Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang	98,44	100	1,02	1,00	0,02	Efisien

No.	Sasaran/ Kegiatan	Rata-Rata Capaian Target Indikator		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
		% Input	% Output				
	Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Tindak Lanjut atas Pemeriksaan Kinerja BPK RI						
	Pendampingan BPK RI	99,86	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	99,99	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Pemantauan dan Monitoring Evaluasi	99,88	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
6	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM Sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019						
	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	99,88	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I	99,86	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Evaluasi dan Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan	96,83	100	1,03	1,00	0,03	Efisien
	Audit Internal QMS ISO Inspektorat I	89,51	100	1,12	1,00	0,12	Efisien
	Audit Surveillance QMS ISO Inspektorat I	99,96	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Tinjauan Manajemen Unit Kerja (Inspektorat I)	99,92	100	1,00	1,00	0,00	Efisien
	Dukungan Manajemen Pengawasan Interm Keuangan dan Umum - Program	97,33	100	1,03	1,00	0,03	Efisien

## Lampiran 11

### PENGUKURAN KINERJA INSPEKTORAT I TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>				
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	80%	88,89%	111,11%
Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	2. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	82	81,79	99,74%
<i>Internal Process Perspective</i>				
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	3. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	92%	100%	108,69%
Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern BPOM yang andal di wilayah Inspektorat I	4. Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	90%	82,36%	91,51%
	5. Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	23	23	100%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	6. Persentase laporan keuangan Satker yang bebas dari kesalahan material	100%	100%	100%
	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	80%	94,24%	117,80%
	8. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	90,33%	106,28%
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP	81	78,14	96,47%

Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 7.436.030.000

Realisasi Anggaran : Rp 7.283.119.73

Lampiran 12

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT I TAHUN 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional			Realisasi		Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
		Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(7)	(10) = (9)/(8)
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>									
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti adalah rasio jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi hasil penelusuran pengaduan yang diberikan.	Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	Jumlah rekomendasi hasil penelusuran pengaduan x 100%.	8	9	80%	88,89%	111,11%
Meningkatnya peran Inspektorat I sebagai Trusted Advisor	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.  Pengukuran tingkat keberhasilan tersebut dilakukan melalui survei menggunakan skala 1 s.d 5 untuk setiap pertanyaan. Adapun Aspek komponen pertanyaan merupakan unsur Quality Service: Wujud Tangible (Fisik) Keandalan (Reability) Kesigapan (Responsiveness) Jaminan (Assurance) Empati (Emphaty)	7. Survei dilaksanakan secara acak dengan mengirimkan kuesiner kepada Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja 8. Responden mengisi untuk setiap pertanyaan yang diberikan 9. Pengisian jawaban menggunakan scala likert 1 s.d 4 10. Dilakukan perhitungan dan rekapitulasi nilai 11. Nilai rata-rata x 20 12. Diperoleh nilai indeks kepuasan mitra pengawasan intern ( <i>Trusted Advisor</i> )		81,79	-	82	81,79	99,74%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional			Realisasi		Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)
		Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(7)	(10) = (9)/(8)
<i>Internal Process Perspective</i>									
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	<p>Roadmap RB Badan POM adalah Pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Badan POM dan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak dari seluruh jajaran Badan POM, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah, dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara terpadu dan utuh.</p> <p>Area perubahan pengawasan adalah penataan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan dengan menjalankan pengelolaan keuangan yang andal dan terpercaya.</p> <p>Rencana Aksi adalah serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan.</p>	Jumlah laporan realisasi rencana aksi	Jumlah rencana aksi	13	13	92%	100%	108,69%
Tata kelola, manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM yang Andal di wilayah Inspektorat I	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja merupakan suatu kondisi yang menggambarkan baiknya sistem pengendalian intern di unit kerja ditinjau dari lima unsur sistem pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, analisis risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang telah diverifikasi oleh APIP.	Nilai rata-rata PM-EPITE unit kerja yang telah diverifikasi oleh APIP.		82,36%	-	90%	82,36%	96,89%
	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja	Dihitung dari jumlah Laporan Hasil Pengawasan Intern pada mitra kerja Inspektorat I	Jumlah total laporan hasil pengawasan intern		23	-	23	23	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional			Realisasi		Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)						
		Indikator Kinerja	Pembilang	Penyebut	Pembilang	Penyebut									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(7)	(10) = (9)/(8)						
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	Laporan Keuangan adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari : 1) Laporan Realisasi Anggaran; 2) Neraca; 3) Laporan Operasional; 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 5) Catatan atas Laporan Keuangan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dinyatakan bebas dari kesalahan material jika rekomendasi nilai setoran kerugian negara < 3 per mil dari nilai total anggaran satker/unit kerja. Opini atas Laporan Keuangan Badan POM akan memenuhi salah satu opini BPK RI yang terdiri atas, WTP, WTP DPP, WDP, TMP.	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM Persentase Capaian WTP : WTP : Wajar Tanpa Pengecualian (Opini terbaik) 100% WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas 97% WDP : Wajar Dengan Pengecualian 95% TMP : Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) 75% Tidak Wajar : Adversed Opinion 50%		100%	-	100%	100%	100%						
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindak lanjuti BPOM	Persentase Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti. Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan memperoleh status 'CLOSE' (Status 1 dan Status 4) / Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan) x 100% Status Tindak Lanjut yang diberikan BPK RI: <table border="1" data-bbox="645 1155 1104 1256"> <tr> <td>Status 1</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Sesuai Saran</td> </tr> <tr> <td>Status 2</td> <td>:</td> <td>Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran</td> </tr> </table>	Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran	Status 2	:	Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran	Jumlah rekomendasi yang telah sesuai saran	Jumlah rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	327	347	80%	94,24%	117,80%
Status 1	:	Tindak lanjut telah Sesuai Saran													
Status 2	:	Tindak lanjut telah Belum Sesuai Saran													

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional			Realisasi		Target 2019	Realisasi 2019	Nilai Pencapaian Sasaran (%)		
		Indikator Kinerja		Pembilang	Penyebut	Pembilang				Penyebut	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)/(7)	(10) = (9)/(8)
		Status 3	:	Belum Tindak lanjut							
		Status 4	:	Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah							
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	Persentase Jumlah Hasil Audit Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti. Dihitung dari: (Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti / Jumlah total rekomendasi pengawasan intern) x 100%			Jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti	Jumlah total rekomendasi pengawasan intern	1.215	1.345	85%	90,33%	106.28%
<i>Learning and Growth Perspective</i>											
Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Inspektorat I			Melakukan evaluasi dari sumber data yang diperoleh sesuai dengan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai AKIP merupakan jumlah nilai total dari komponen : 1. Perencanaan kinerja dengan bobot 30% 2. Pengukuran kinerja dengan bobot 25% 3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% 4. Evaluasi internal dengan bobot 10% 5. Capaian kinerja dengan bobot 20%		78,14	-	81	78,14	96,47

Lampiran 13

**CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT I TAHUN 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(3)	(12) = (8)/(4)	(13) = (9)/(5)	(14) = (10)/(6)
<b>Stakeholder/Customer Perspective</b>													
Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019 di lingkup wilayah Inspektorat I.	Perentase tindak lanjut rekomendasi hasil penelusuran pengaduan	--	--	--	80%	100%	100%	80%	88,89%	--	--	--	111,11%
Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	--	--	--	82	--	--	--	81,79	--	--	--	99,74%
<b>Internal Process Control</b>													
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan pengawasan RB BPOM	--	--	92%	92%	--	--	--	100%	--	--	--	108,69%
Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern	Tingkat keandalan SPIP pada mitra kerja	--	--	--	90	--	--	--	82,36	--	--	--	91,51%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Nilai Pencapaian Sasaran (%)			
		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (7)/(3)	(12) = (8)/(4)	(13) = (9)/(5)	(14) = (10)/(6)
BPOM yang andal di lingkup	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	6	11	17	23	6	12	18	23	100%	92%	94%	100%
Terjaminnya laporan keuangan BPOM yang sesuai SAP di lingkup wilayah Inspektorat I	Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari kesalahan Material	--	100%	--	100%	--	100%	--	100%	--	100%		100%
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	--	80%	--	80%	--	88,62%	--	94,24%	--	110,77%	--	117,80%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	85%	85%	85%	85%	88,20%	93%	93,55%	90,33%	96,37%	109,41%	110,06%	106,28%
<b>Learning and Growth Perspective</b>													
Terwujudnya RB Inspektorat I sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Inspektorat I	--	--	--	81	--	--	--	78,14	--	--	--	96,47%

## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.  
Jabatan : Plt. Inspektur I  
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., MP  
Jabatan : Inspektur Utama  
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jakarta, 9 Desember 2019  
Pihak Pertama,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 INSPEKTORAT I

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	9,2
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	1%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	82
4.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat I	75
5.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti secara tuntas	70%
6.	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Indeks RB Inspektorat I	91
		Nilai AKIP Inspektorat I	81
7.	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	85



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
 Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat I yang terinterasi dan adaptif	Persentase pengelolaan TIK Inspektorat I yang baik	70%
9.	Terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	88% Efisien

### Program

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan

### Anggaran

Rp21.495.137.000,-

### Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I

### Anggaran

Rp5.998.944.000,-

### Output

Laporan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I yang sesuai standar mutu

### Anggaran

Rp5.998.944.000,-

Inspektur Utama,



Dra. Eln Herlina, Apt., MP

Jakarta, 9 Desember 2019

Plt. Inspektur I,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
INSPEKTORAT I**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	(3) Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	-	-	-	9,2	635.885.000,-
			-	-	-	81	63.390.000,-
			-	-	-	100%	20.700.000,-
			-	75%	-	-	102.125.000,-
2.	Terkelolanya Badan POM secara transparan dan akuntabel	(2) Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	-	-	1%	1%	1.111.733.000,-
			-	88%	-	88%	28.830.000,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Anggaran (Rupiah)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	(8)	
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	-	-	-	82	-	
4.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	94%	96%	98%	100%	1.550.832.000,-	
5.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat I	-	-	-	75	-	
6.	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	87%	88%	89%	90%	129.370.000,-	
7.	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti secara tuntas	-	50%	65%	70%	120.660.000,-	
		Indeks RB Inspektorat I	-	-	-	91	-	
		Indeks AKIP Inspektorat I	-	-	-	81	63.390.000,-	
		Indeks profesionalitas Inspektorat I	60	70	80	85	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03 (4)	B06 (5)	B09 (6)	B12 (7)	
8.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat I yang terintegrasi dan adaptif	Persentase pengelolaan Inspektorat I yang baik	-	-	-	70%	
9.	Terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat efisiensi anggaran Inspektorat I penggunaan	-	-	-	88% Efisien	2.172.029.000

Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP

Jakarta, 9 Desember 2019  
Plt. Inspektur I,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR PR. 04. 01. 71. 12. 19. 2906  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020**

**INSPEKTUR I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat I pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139

Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com , inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020.



## **BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

Kedua : Keputusan Plt. Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2019

Plt. Inspektur I,



Dra. Zulamah, Apt., M.Si.



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
 Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN PLT. INSPEKTUR I BADAN POM  
 NOMOR PR. 04. 01. 71. 12. 19. 2906  
 TENTANG  
 RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I  
 TAHUN 2020

#### RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BPOM TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	9,2
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	81
		Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat I	100%
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	75%
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	1%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	82
4.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100%
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern Inspektorat I	75
5.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang	Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat	70%



**BADAN POM**

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. (021) 4227756, 42878164, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; fax : 4245139  
Email : tuinspektorat1bpom@gmail.com, inspektorat1@pom.go.id, infopom@indo.net.id ; Website : www.pom.go.id

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	efektif	I yang ditindaklanjuti secara tuntas	
6.	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	Indeks RB Inspektorat I Nilai AKIP Inspektorat I	91 81
7.	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	85
8.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat I yang terinterasi dan adaptif	Persentase pengelolaan TIK Inspektorat I yang baik	70%
9.	Terkelolanya keuangan Inspektorat I secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	88% Efisien

Jakarta, 9 Desember 2019

Pt. Inspektur I,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.



**Badan Pengawas Obat dan Makanan**  
**Jl.Percetakan Negara No. 23**